



KOMDIGI

Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN DIGITAL

TAHUN ANGGARAN 2024

DESEMBER 2024

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Digital

Jalan Medan Merdeka Barat 9, Jakarta, 10110

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namó Buddhaya. Salam Kebajikan.

Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang diberikan sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (selanjutnya disebut, "Sekretariat BPSDM) BPSDM Komdigi, Kementerian Komdigi Tahun 2024 rampung pada waktunya.

LAKIP merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja memerlukan pengukuran kinerja yang tepat dan evaluasi yang efektif, serta pengungkapan (*disclosure*) terhadap hasil analisis pengukuran kinerja. Secara lebih rinci, tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, sekaligus sebagai upaya instansi pemerintah dalam melakukan perbaikan berkesinambungan atas kinerja yang dilakukan. Oleh karena itu, LAKIP ini diharapkan dapat memuat informasi uraian singkat organisasi,

rencana dan target kinerja yang ditetapkan, serta pengukuran, evaluasi, dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud, termasuk mencakup efisiensi penggunaan sumber daya^[1].

Lebih lanjut, dari sisi peraturan perundang-undangan, LAKIP merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2024, Sekretariat Badan Pengembangan SDM Komdigi melanjutkan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan SDM Komdigi 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta mendukung pelaksanaan dan pencapaian program/kegiatan Badan Pengembangan SDM Komdigi, utamanya yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian Komdigi 2020-2024.

LAKIP Sekretariat Badan Pengembangan SDM Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang pencapaian Badan Pengembangan SDM sepanjang tahun 2024, termasuk langkah-langkah yang telah diambil dalam pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan SDM. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya sempurna dalam mencerminkan akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan, namun kami berharap melalui LAKIP ini, kami dapat memperoleh masukan konstruktif dari masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk mendukung pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, khususnya dalam pengembangan SDM Indonesia, serta untuk menunjukkan capaian kinerja dan kontribusi tambahan yang telah kami hasilkan.



Dengan segenap ketulusan hati dan rasa hormat, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung Sekretariat Badan Pengembangan SDM dan Badan Pengembangan SDM Komdigi dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai amanat.



Jakarta, 25 Februari 2025

**Sekretaris Badan
Pengembangan SDM Komdigi**

I Nyoman Adhiarna

[1] Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	2
B. Tugas dan Fungsi.....	4
C. Sumber Daya Manusia Sekretariat Badan Pengembangan SDM Komdigi.....	6
D. Budaya Organisasi Sekretariat Badan Pengembangan SDM Komdigi.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Indikator Kinerja.....	10
B. Perjanjian Kinerja	
1. Persentase (%) Peserta yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Kementerian Komdigi Lulus Tepat Waktu.....	13
2. Jumlah Penerima Program Beasiswa S2 dan S3 Internal Kementerian Komdigi.....	13
3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	13
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	13
5. Nilai Maturitas SPIP BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	14
6. Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	14
7. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	14
8. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran UAKPA BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	15
9. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	15
10. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di BPSDM Komdigi pada Tahun 2024.....	15
11. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di BPSDM Komdigi pada Tahun 2024.....	16
12. Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Telaah Hukum dan Kerjasama di BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	16
13. Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	16

14. Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	16
15. Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Komdigi yang dilakukan secara Elektronik (<i>E-Purchasing</i>) Tahun 2024.....	17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Sekretariat Badan Pengembangan SDM dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	20
Capaian Sekretariat Badan Pengembangan SDM dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	21
SK.1 Meningkatkan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Digital.....	22
IKSK 1.1. Persentase (%) Peserta yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Kementerian Komdigi yang Lulus Tepat Waktu.....	22
IKSK 1.2. Jumlah Penerima Program Beasiswa S2 dan S3 Internal Kementerian Komdigi.....	25
IKSK 2.1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	26
IKSK 2.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	31
IKSK 2.3. Nilai Maturitas SPIP BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	33
IKSK 2.4. Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	36
IKSK 2.5. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	39
IKSK 2.6. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	41
IKSK 2.7. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	42
IKSK 2.8. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	44
IKSK 2.9. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di BPSDM Komdigi pada Tahun 2024.....	46
IKSK 2.10. Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Telaah Hukum dan Kerjasama di BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	49

IKSK 2.11. Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	50
IKSK 2.12. Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	52
IKSK 2.13. Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Komdigi yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024.....	55
B. REALISASI ANGGARAN.....	58
BAB IV PENUTUP.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	xiii
LAMPIRAN.....	xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Capaian Sekretariat Badan Pengembangan SDM Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	20
Tabel 3.2 Capaian Sekretariat Badan Pengembangan SDM Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	21
Tabel 3.3 Persentase (%) Peserta yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Kementerian Komdigi yang Lulus Tepat Waktu.....	22
Tabel 3.4 Jumlah Penerima Program Beasiswa S2 dan S3 Internal Kementerian Komdigi.....	25
Tabel 3.5 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	26
Tabel 3.6 Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	31
Tabel 3.7 Nilai Maturitas SPIP BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	33
Tabel 3.8 Tabel 3.8 Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	36
Tabel 3.9 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	39
Tabel 3.10 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	41
Tabel 3.11 Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	42
Tabel 3.12 Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di BPSDM Komdigi pada Tahun 2024.....	44
Tabel 3.13 Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di BPSDM Komdigi pada Tahun 2024.....	46
Tabel 3.14 Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Telaah Hukum dan Kerjasama di BPSDM Komdigi pada Tahun 2024.....	49
Tabel 3.15 Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	50

Tabel 3.16 Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Komdigi Tahun 2024.....	52
Tabel 3.17 Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Komdigi yang dilakukan secara Elektronik (<i>E-Purchasing</i>) Tahun 2024.....	55
Tabel 3.18 Kinerja Anggaran Badan Pengembangan SDM Komdigi 2023-2024.....	58
Tabel 4.1 Performa Indikator Kinerja Sasaran Program	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pengembangan SDM Komdigi.....	5
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Badan Pengembangan SDM Komdigi.....	5
Gambar 1.3 Gambaran Pegawai/SDM Sekretariat Badan Pengembangan SDM Komdigi Tahun 2024	6
Gambar 1.4 Data JFT Sekretariat Badan Pengembangan SDM Komdigi Tahun 2024.....	7
Gambar 1.5 Strategi 6P.....	7
Gambar 1.6 Konsep BerAKHLAK.....	8
Gambar 3.1 Realisasi Anggaran Persentase (%) Peserta yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Kementerian Komdigi.....	23
Gambar 3.2 Jumlah Penerima Program Beasiswa S2 dan S3 Internal Kementerian Komdigi Tahun 2024.....	25
Gambar 3.3 Arah Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB).....	27
Gambar 3.4 Realisasi Anggaran Reformasi Birokrasi Tahun 2024.....	29
Gambar 3.5 Realisasi Anggaran Nilai AKIP Tahun 2024.....	32
Gambar 3.6 Realisasi Anggaran Nilai Maturitas SPIP Tahun 2024.....	34
Gambar 3.7 Realisasi Anggaran Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024.....	37
Gambar 3.8 Realisasi Anggaran UAPPA-EI Tahun 2024.....	40
Gambar 3.9 Realisasi Anggaran Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di BPSDM Komdigi pada Tahun 2024.....	46

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAKIP Sekretariat Badan Pengembangan SDM Tahun 2024 merupakan perwujudan dari penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah⁽²⁾ dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah⁽³⁾.

LAKIP Tahun 2024 memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Badan Pengembangan SDM, BPSDM Komdigi tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Badan Pengembangan SDM dalam mendukung BPSDM Komdigi untuk pencapaian visi, misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, Renstra Kementerian Komdigi 2020-2024, Renstra BPSDM Komdigi 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pada tahun 2024, Sekretariat Badan Pengembangan SDM telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Program (SP) dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSK). Pada Tahun Anggaran 2024, pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan SDM adalah sebagai berikut:

1. Dari 15 (lima belas) IKSK yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengembangan SDM, terdapat 13 (tiga belas) IKSK yang berhasil memperoleh capaian kinerja lebih dari 80%, bahkan beberapa diantaranya berhasil melampaui target yang ditetapkan. IKSK tersebut, yaitu:
 - a. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPSDM Komdigi Tahun 2024
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) BPSDM Komdigi Tahun 2024
 - c. Nilai Maturitas SPIP BPSDM Komdigi Tahun 2024
 - d. Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Komdigi Tahun 2024
 - e. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) BPSDM Komdigi Tahun 2024
 - f. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BPSDM Komdigi Tahun 2024
 - g. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Komdigi Tahun 2024
 - h. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di BPSDM Komdigi

- i. Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Telaah Hukum dan Kerjasama di BPSDM Komdigi Tahun 2024
 - j. Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen BPSDM Komdigi Tahun 2024
 - k. Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Komdigi Tahun 2024
 - l. Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Komdigi yang Dilakukan secara Elektronik (*E-Purchasing*) Tahun 2024
2. Terdapat 1 (satu) IKSK dari total 15 (Lima Belas) IKSK telah ditetapkan telah memperoleh capaian kinerja lebih dari 50% pada TA 2024, IKSK tersebut yaitu:
 - a. Persentase (%) Peserta yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Kementerian Komdigi yang Lulus Tepat Waktu.
 3. Terdapat 1 (satu) IKSK dari total 15 (Lima belas) IKSK belum dapat mencapai target karena BPSDM Komdigi belum bisa mengembalikan nilai temuan pada tahun sebelumnya. Dari sisi akuntabilitas keuangan, Sekretariat Badan Pengembangan SDM tahun memiliki alokasi anggaran 2024 sebesar Rp 70.300.115.000 dengan realisasi anggaran (s.d. 31 Desember) Rp 69.440.823.961 (98,78%).



Kondisi lebih detail mengenai capaian kinerja tersebut akan ditampilkan pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Demi mewujudkan kinerja maksimal dan mencapai target yang telah ditetapkan, Sekretariat Badan Pengembangan SDM bertekad untuk menangani dan mencari solusi atas setiap kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, Sekretariat Badan Pengembangan SDM juga menjalankan Manajemen Risiko secara rutin untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang timbul, serta melakukan tindak lanjut yang diperlukan.

[2] Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80
[3] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842

Oleh karena itu, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak yang terlibat, serta menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan kinerja Sekretariat Badan Pengembangan SDM.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut sebagai, “Badan Pengembangan SDM”) merupakan salah satu unit kerja eselon I di Kementerian Komunikasi dan Digital (selanjutnya disebut sebagai, “kementerian Komdigi”) yang menjalankan fungsi pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika^[4].

Dalam mendukung Badan Pengembangan SDM untuk menjalankan fungsi tersebut, Badan Pengembangan SDM didukung oleh Sekretariat Badan Pengembangan SDM yang merupakan Satuan Kerja setingkat Eselon II di lingkungan kantor pusat. Sekretariat Badan Pengembangan SDM mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan layanan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM.

Namun, sejak berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Pasal 3 yang mengatur bahwa BRIN berperan membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenagapenelitian

dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi serta melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi. Serta, berdasarkan Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa tugas, fungsi dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN^[5]. Maka sejak peraturan tersebut diundangkan, tugas dan fungsi penelitian di Badan Pengembangan SDM secara resmi telah beralih ke BRIN.

Kemudian, dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital pada pasal 30 yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan digital^[6].

Oleh karena itu, menindaklanjuti peraturan-peraturan yang secara resmi telah berlaku tersebut, sejak 2023 Badan Pengembangan SDM berubah menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi) dan hingga saat ini, BPSDM Komdigi dalam proses penyesuaian Standar Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru, termasuk penyesuaian nomenklatur Sekretariat

Badan Pengembangan SDM.

Presiden Joko Widodo menekankan bahwa kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yaitu melalui pembangunan sumber daya manusia. Tahun 2024, 2029, dan 2034 merupakan tahun penting untuk menentukan langkah Indonesia untuk melompat maju^[7]. Oleh karena itu, sebagai penjabaran tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 memiliki kedudukan yang penting.

Tujuan dari periode terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Hal tersebut dilakukan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dan menekankan pentingnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing^[8].

Berangkat dari latar belakang kebijakan di atas, serta dengan mempertimbangkan hasil penelitian Bank Dunia dan McKinsey bahwa kebutuhan talenta digital Indonesia mencapai 9 juta orang dengan kebutuhan rata-rata 600.000 orang per tahun dalam kurun waktu tahun 2015 - 2030, ^[9]melalui BPSDM Komdigi, Kementerian Komdigi berupaya memanfaatkan bonus demografi dengan menjalankan berbagai program

pengembangan SDM yang menasar kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini, sebagai Satuan Kerja setingkat Eselon II yang berkedudukan di wilayah Pusat, Sekretariat Badan Pengembangan SDM memiliki peran vital dalam melaksanakan dukungan manajemen dan layanan teknis kepada seluruh Satuan Kerja dan UPT di lingkungan BPSDM Komdigi.

Dukungan manajemen dan layanan teknis yang efektif menjadi dasar yang sangat penting untuk mendukung BPSDM Komdigi melaksanakan fungsi dan mencapai berbagai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024, dan Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Komdigi 2020-2024.

Oleh karena itu, Sekretariat Badan Pengembangan SDM terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dan layanan teknis.

[4] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96.

[5] Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2021

[6] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital

[7] <https://www.komdigi.go.id/content/detail/52769/presiden-tekanan-pembangunan-sdm-kunci-indonesia-emas-2045/0/berita>

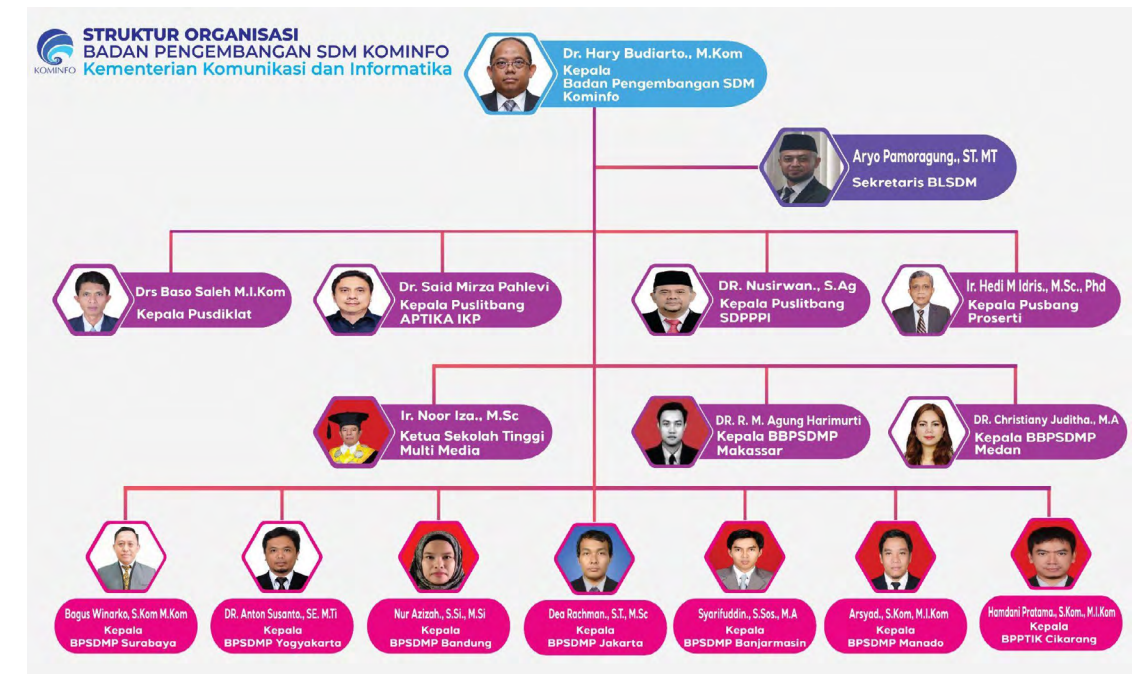
[8] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: Batang Tubuh dan Lampiran I. Narasi

[9] <https://ba.pengembangansdm.komdigi.go.id/berita-kepala-baru-semangat-baru-19-712>

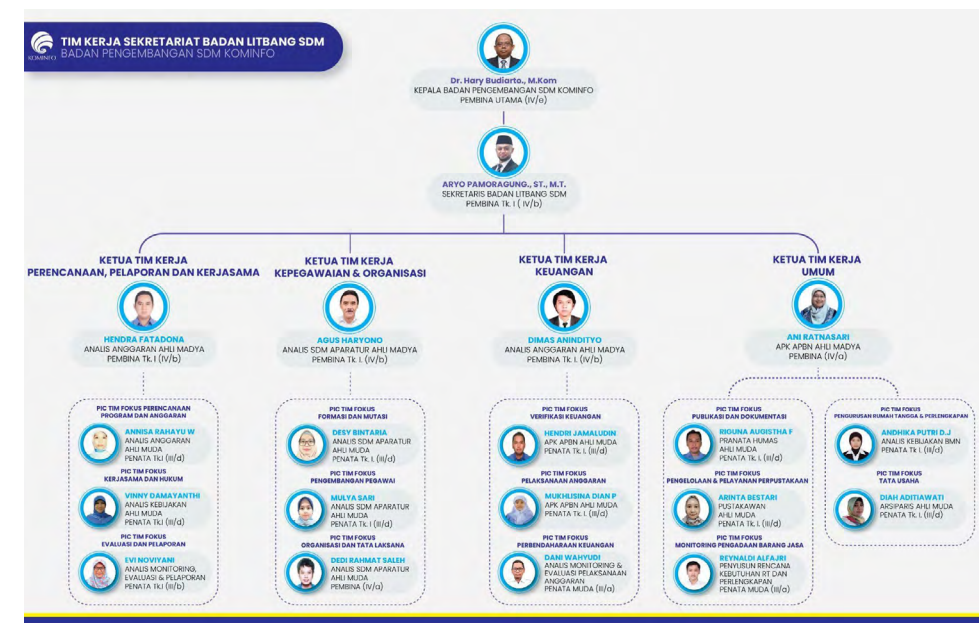
B. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Badan Pengembangan SDM memiliki tugas melaksanakan dukungan manajemen dan layanan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPSDM Komdigi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Badan Pengembangan SDM menjalankan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
2. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum dan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
3. Pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Badan;
4. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi fora internasional di bidang pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
5. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Badan;
6. Pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan tata usaha di lingkungan Badan.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pengembangan SDM Komdigi



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Badan Pengembangan SDM Komdigi

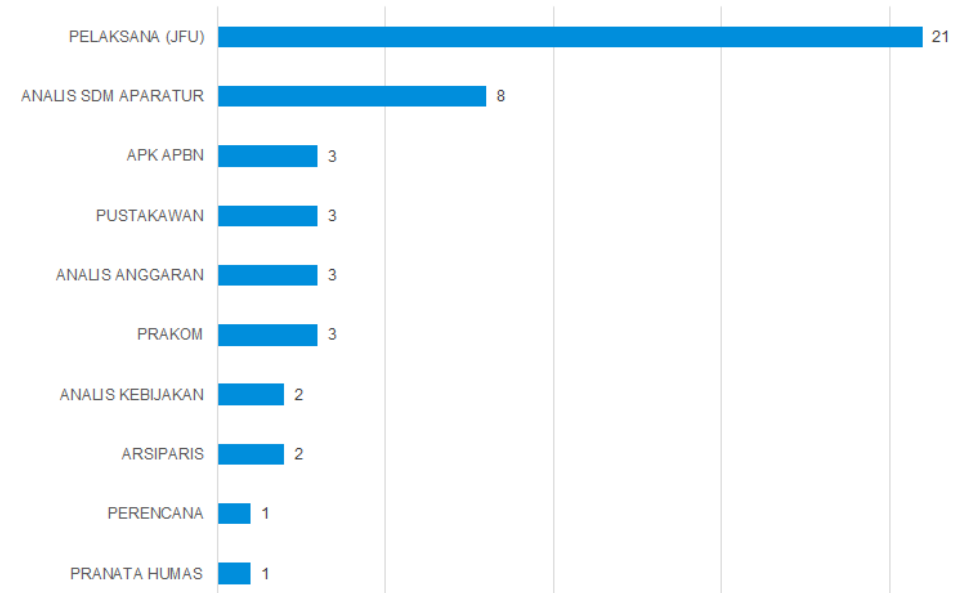
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Badan Pengembangan SDM didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional Namun pada saat ini, peraturan terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

sedang dalam proses penyusunan revisi untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini. Revisi ini bertujuan untuk memisahkan fungsi penelitian dari *core business* BPSDM Komdigi di Kementerian Komunikasi dan Digital.

C. Sumber Daya Manusia Sekretariat Badan Pengembangan SDM Komdigi

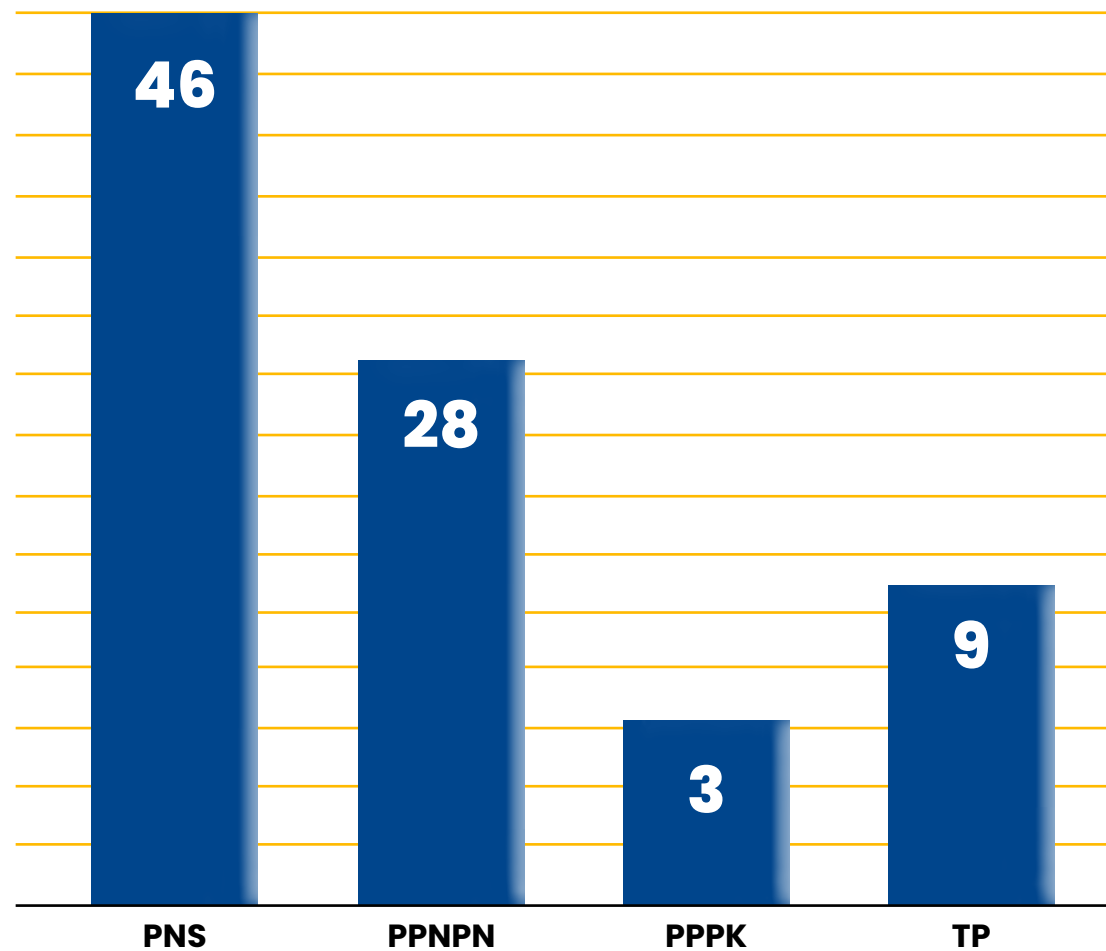
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Badan Pengembangan SDM didukung oleh 86 pegawai dengan rincian 46 orang tercatat sebagai PNS, 3 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 28 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 9 orang Tenaga Pendukung.

Rincian pengelompokan pangkat jabatan terdiri dari 21 pegawai merupakan Pelaksana (JFU), 8 pegawai Analis SDM Aparatur, 3 pegawai APK APBN, 3 pegawai Pustakawan, 3 pegawai Analis Anggaran, 3 pegawai Prakom, 2 pegawai Analis Kebijakan, 2 pegawai Arsiparis, 1 pegawai Perencana, dan 1 pegawai Pranata Humas.



Gambar 1.4 Data JFT Sekretariat Badan Pengembangan SDM Komdigi Tahun 2024

JENJANG PEGAWAI SEKRETARIAT BPSDM 2024



Gambar 1.3 Gambaran Pegawai/SDM Sekretariat Badan Pengembangan SDM Tahun 2024

D. Budaya Organisasi Sekretariat Badan Pengembangan SDM Komdigi

Demi mendukung budaya organisasi yang berlandaskan kepada *core value* atau Tata Nilai Dasar yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, Sekretariat Badan Pengembangan SDM mendorong dan mengharapkan seluruh pegawai di lingkungannya dapat memenuhi harapan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Memahami dan menyesuaikan

perilaku dengan *Core Values* ASN, yang berlandaskan pada panduan perilaku atau kode etik, mencakup berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut tidak hanya terbatas pada evaluasi kinerja, tunjangan kinerja (*tukin*), *bonus*, *talent class*, tetapi juga meliputi peluang pengembangan karir dan kesempatan untuk pembelajaran serta pengembangan (*learning & development*).



Gambar 1.5 Strategi 6P

- Bersama-sama membangun *Employer Branding* ASN yang kuat di masyarakat yang Berorientasi Pelayanan **Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif (BerAKHLAK)**.



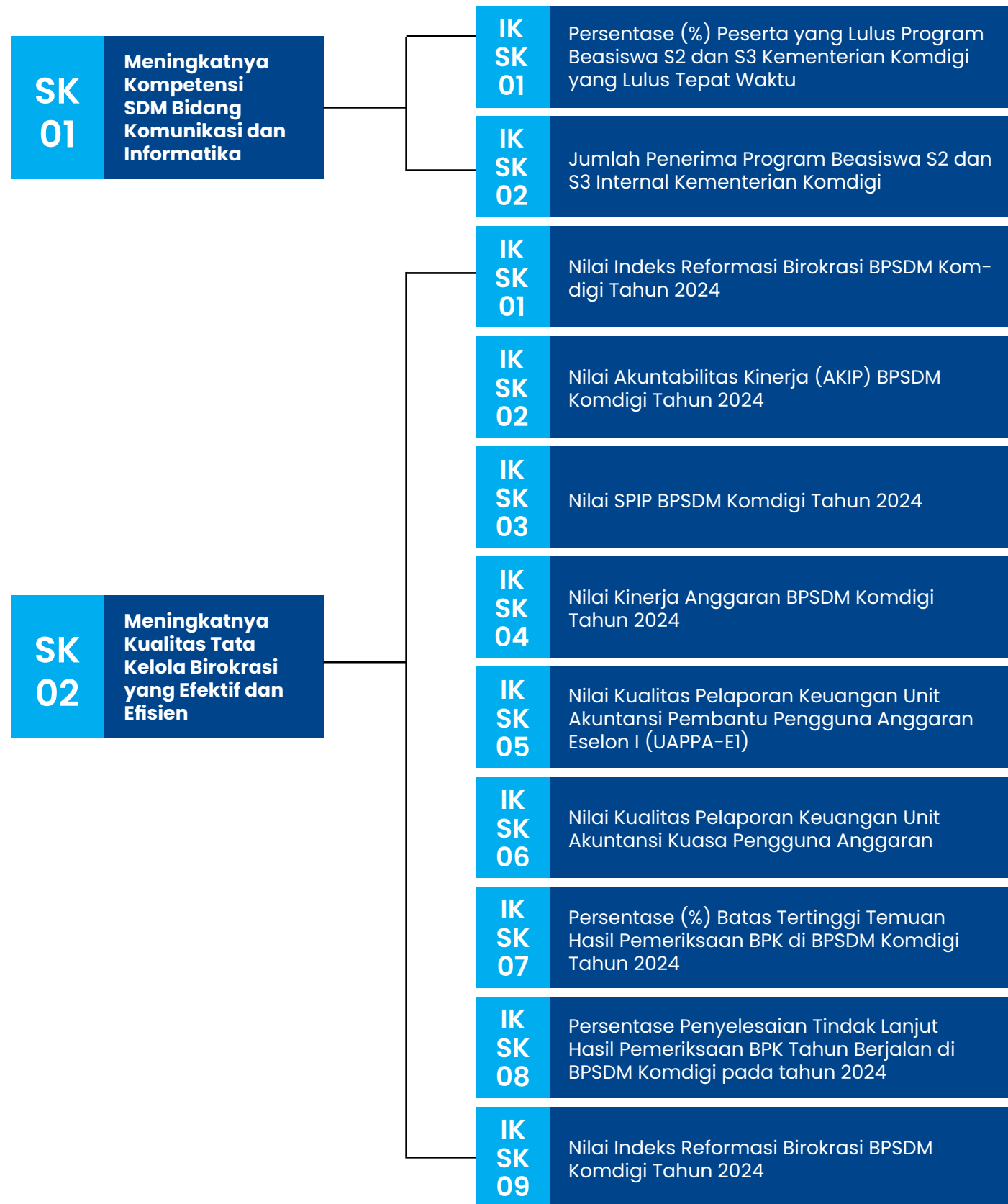
Gambar 1.6 Konsep BerAKHLAK

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

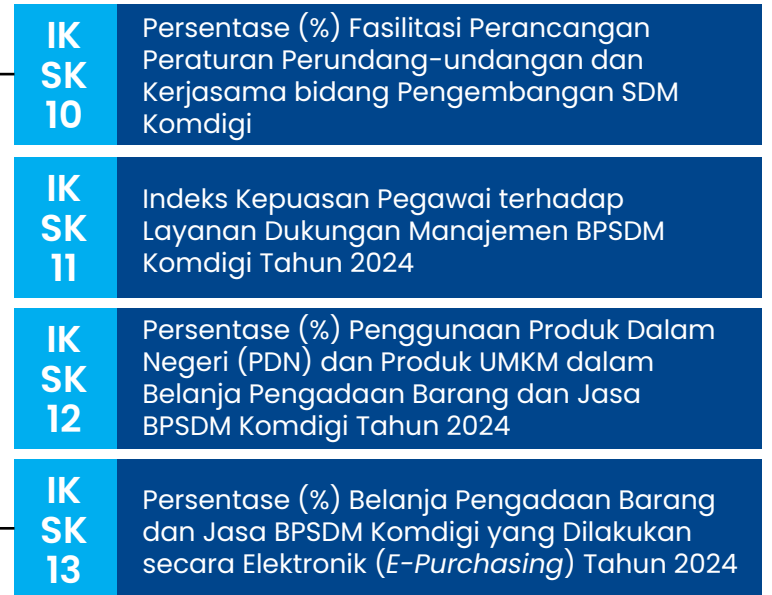
A. Indikator Kinerja

Adapun Indikator Kinerja yang dirumuskan berdasarkan Sasaran Program pada lingkup Sekretariat Badan Pengembangan SDM adalah sebagai berikut:



SK 02

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien



B. Perjanjian Kerja

Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengembangan SDM Tahun 2024 yang ditandatangani pada bulan Juli 2024 oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Komdigi (Pihak Pertama) dan Sekretaris Badan Pengembangan SDM (Pihak ke-Dua), memiliki 2 (dua) Sasaran Program dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Sasaran Program yang dapat dilihat pada matriks sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja ini.
2. Bersedia dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini secara akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
5. Bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	1. Persentase (%) Peserta yang Lulus Program Beasiswa S2 Dan S3 Kementerian Kominfo yang Lulus Tepat Waktu	90% (3 peserta dari 4 peserta)
		2. Jumlah Penerima Program Beasiswa S2 Dan S3 Internal Kementerian Kominfo	50 Orang
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BPSDM Kominfo yang Bersih dan Efisien	1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPSDM Kominfo Tahun 2024	91 (Penilaian Itjen)
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) BPSDM Kominfo Tahun 2024	72,85 (Penilaian Itjen)
		3. Nilai Maturitas SPIP BPSDM Kominfo Tahun 2024	3,19 (Penilaian Itjen)
		4. Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Kominfo Tahun 2024	93,69
		5. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eseiion I (UAPPA-E1) BPSDM Kominfo Tahun 2024	90
		6. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BPSDM Kominfo Tahun 2024	98
		7. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Kominfo Tahun 2024	≤ 1%
		8. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di BPSDM Kominfo pada Tahun 2024	70%
		9. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di BPSDM Kominfo pada Tahun 2024	30%
		10. Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Telaah Hukum dan Kerjasama di BPSDM Kominfo Tahun 2024	100%
		11. Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen BPSDM Kominfo Tahun 2024	3,91
		12. Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Kominfo Tahun 2024	Min. 40% (dari total Nilai Anggaran Belanja Barang/Jasa)

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		13. Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Kominfo yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024	Min. 30% (dari total Rencana Pengadaan Melalui Penyedia)

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengembangan Kompetensi Digital Bagi Masyarakat	Rp. 20.331.009.000
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Balitbang SDM	Rp. 53.731.434.000
	Total Anggaran	Rp. 74.062.443.000

Jakarta, 9 Juli 2024

Pejabat Penilai
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika,


Hary Budiarto

Pejabat yang Dinilai
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia


Aryo Pamoragung

Untuk mencapai target kinerja Sekretariat Badan Pengembangan SDM tahun 2024, rencana kerja dilakukan melalui 15 (lima belas) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

1. Persentase (%) Peserta yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Kementerian Komdigi Lulus Tepat Waktu

Kementerian Komdigi melalui Sekretariat Badan Pengembangan SDM, BPSDM Komdigi menyelenggarakan program pemberian beasiswa S2 dan S3 untuk internal Kementerian Komdigi sebagai upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Komunikasi dan Informatika agar lebih kompeten, handal, dan profesional serta memiliki daya saing tinggi melalui pendidikan formal.

Penyelenggaraan program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi terbaik di dalam maupun luar negeri. Adapun tujuan dari indikator ini yaitu untuk memastikan para penerima beasiswa pada lingkup Kementerian Komdigi berhasil menyelesaikan studinya sesuai dengan masa studi normal untuk setelahnya dapat kembali berkontribusi kepada unit kerja mereka masing-masing. Hal ini dilakukan dengan mengimplementasikan segala wawasan yang diperoleh, baik secara formal maupun informal, selama menjalani perkuliahan pascasarjana.

2. Jumlah Penerima Program Beasiswa S2 dan S3 Internal Kementerian Komdigi

Dalam mendukung keberhasilan program Beasiswa S2 dan S3, Sekretariat Badan Pengembangan SDM turut menyelenggarakan program penerimaan Beasiswa S2 dan S3 pada lingkup internal Kementerian Komdigi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan, daya saing, dan inovasi di Kementerian Komdigi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, BPSDM Komdigi bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi ternama di dalam dan luar negeri.

3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPSDM Komdigi Tahun 2024

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Implementasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan.

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) BPSDM Komdigi Tahun 2024

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di BPSDM Komdigi mengacu pada Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Tujuan spesifiknya adalah: (a) mengumpulkan informasi tentang penerapan SAKIP; (b) menilai pelaksanaan SAKIP; (c) menilai akuntabilitas kinerja; (d) memberikan rekomendasi perbaikan; dan (e) memantau tindak lanjut rekomendasi sebelumnya. Ruang lingkup evaluasi meliputi kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas internal, serta capaian kinerja pada level kementerian dan unit kerja.

5. Nilai Maturitas SPIP BPSDM Komdigi Tahun 2024

Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang menyeluruh, dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Proses ini mencakup pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencerminkan tingkat kematangan dan efektivitas pengendalian internal di instansi pemerintah. Maturitas SPIP diukur berdasarkan sejauh mana pengendalian internal diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Penilaian ini melibatkan evaluasi terhadap kebijakan, prosedur, serta implementasi pengendalian yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP, semakin baik pengelolaan pengendalian internal dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

6. Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Komdigi Tahun 2024

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian atas kinerja anggaran Badan Pengembangan SDM Komdigi tahun 2024 oleh Kementerian Keuangan. Adapun penilaian tersebut terdiri dari 50% pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, sementara 50% merupakan penilaian atas kualitas pelaksanaan anggaran (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA).

7. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) BPSDM Komdigi Tahun 2024

Untuk memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I, maka indikator kinerja ini masuk sebagai salah satu indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Pengembangan SDM Komdigi. Nilai kualitas pelaporan keuangan di level Eselon I selaku UAPPA-EI diukur berdasarkan 2 komponen penilaian yaitu:

1. Komponen penilaian "jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK" yang diperoleh dari uraian yang dicantumkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan;
2. Komponen penilaian "rata-rata nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran" yang diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata nilai laporan keuangan di level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

8. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BPSDM Komdigi Tahun 2024

Untuk memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), maka indikator kinerja ini masuk sebagai salah satu indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Badan Pengembangan SDM Komdigi. Nilai kualitas pelaporan keuangan di tingkat satker yang diukur berdasarkan 2 komponen penilaian yaitu Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang.

9. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Komdigi Tahun 2024

Batas kewajaran atas nilai temuan material dalam pengelolaan keuangan yang dapat mempengaruhi pencapaian opini WTP Kemkomdigi atas Laporan Keuangan BPSDM Komdigi TA 2023 dengan sumber data Laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPSDM Komdigi TA 2023

10. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di BPSDM Komdigi pada Tahun 2024

Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2024 (atas LHP yang keluar pada tahun 2024) yang selesai ditindaklanjuti dengan sumber data Laporan pemantauan TLHP BPK (apabila sampai dengan batas waktu penerbitan LAKIP belum diterbitkan laporan, maka memakai laporan hasil rekon internal oleh APIP bagian TLHP BPSDM Komdigi)

11. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di BPSDM Komdigi pada Tahun 2024

Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya (atas LHP yang keluar pada tahun ≤ 2023) yang telah selesai ditindaklanjuti dengan sumber data Laporan pemantauan TLHP BPK. (apabila sampai dengan batas waktu penerbitan LAKIP belum diterbitkan laporan, maka memakai laporan hasil rekon internal oleh APIP bagian TLHP BPSDM Komdigi)

12. Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Telaah Hukum dan Kerjasama di BPSDM Komdigi Tahun 2024

Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Telaah Hukum dan Kerjasama di BPSDM Komdigi dengan target 25 dokumen dengan Penyusunan naskah dokumen kerja sama, koordinasi dengan satuan kerja terkait kebutuhan kerja sama dengan calon mitra. Sumber data indikator ini adalah Laporan hasil Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kerja sama.

13. Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen BPSDM Komdigi Tahun 2024

Pengukuran Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Internal Sekretariat Badan Pengembangan SDM Komdigi pada tahun 2023, yang bertujuan sebagai bahan

evaluasi dan peningkatan layanan yang berkesinambungan pada Sekretariat Badan Pengembangan SDM dengan fungsi dari masing-masing bidang di antaranya:

1. Layanan bidang Program, Evaluasi serta kerja sama dilakukan melalui koordinasi dengan Setjen, Bappenas, Kemenkeu, Kemenpan RB, K/L, Pemda atas seluruh proses pencapaian indikator.

2. Layanan bidang Keuangan dan Rumah Tangga dilakukan melalui koordinasi dengan Setjen dan Kemenkeu atas seluruh proses pencapaian indikator.

3. Layanan bidang Kepegawaian dan Tata Usaha dilakukan melalui koordinasi dengan Setjen, BKN, KemenpanRB, dan BPKP atas seluruh proses pencapaian indikator.

4. Layanan bidang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan Setjen dan BPK atas seluruh proses pencapaian indikator

14. Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Komdigi Tahun 2024

Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Komdigi Tahun 2024 yang diukur berdasarkan pembelian atau pencatatan melalui Aplikasi SPSE dan SAKTI

15. Persentase (%) Belanja Pengadaan Baran dan Jasa BPSDM Komdigi yang Dilakukan secara Elektronik (e-Purchasing) Tahun 2024

Indikator ini masih memiliki keterkaitan dengan indikator sebelumnya di mana merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Indikator ini dilaksanakan untuk mengukur persentase belanja pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik (*e-purchasing*) lingkup Badan Pengembangan SDM Komdigi tahun 2024.



BAB 3

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Capaian Sekretariat Badan Pengembangan SDM dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKASI KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	PRESENTASE REALISASI 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase (%) Peserta Program Beasiswa S2 dan S3 bidang TIK/ Digital yang Lulus Tepat Waktu	90%	86.20	95,78%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan SDM yang Bersih dan Efisien	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPSDM Komdigi	79,03	91,00	115,15%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPSDM	67,90	72,85	107,29%
		Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM pada Tahun 2023	≤1%	0,03%	100%
		Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di BPSDM pada Tahun 2023	70%	45,45%	64,93%
		Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di BPSDM pada Tahun 2023	30%	30%	100%
		Nilai Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM pada Tahun 2023	87	93,69	107,69%
		Nilai SPIP di BPSDM tahun 2023	3,00	3,19%	106,33%
		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen BPSDM Tahun 2023	3,83	3,91	102,09%
		Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Perundangan-undangan dan Kerjasama bidang Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	228%	228%
		Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA EI)	80	90	112,50%
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80	98	122,50%		

Tabel 3.1 Capaian Sekretariat Badan Pengembangan SDM dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Sekretariat Badan Pengembangan SDM dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKASI KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	PRESENTASE REALISASI 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase (%) Peserta yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Kementerian Komdigi yang Lulus Tepat Waktu	90%	50	55,56%
		Jumlah Penerima Program Beasiswa S2 dan S3 Internal Kementerian Komdigi	50	49	98%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan SDM yang Bersih dan Efisien	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPSDM Komdigi Tahun 2024	91	100	109,89%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPSDM tahun 2024	72,85	74,80	102,68%
		Nilai Maturitas SPIP BPSDM Komdigi Tahun 2024	3,19	3,01	94,36%
		Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Komdigi Tahun 2024	93,69	93,98	100,31%
		Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA EI) BPSDM Komdigi Tahun 2024	90	95	105,56%
		Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BPSDM Komdigi Tahun 2024	98	97,27	99,26%
		Persentase (%) Batas Tertinggi Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Komdigi Tahun 2024	≤1%	0,09%	9%
		Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di BPSDM Komdigi pada tahun 2024	70%	100%	142,86%
		Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di BPSDM Komdigi pada tahun 2024	30%	0	100%
		Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Perundangan-undangan, Telaah Hukum, dan Kerjasama di BPSDM Komdigi Tahun 2024	100%	100%	100%
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen BPSDM Tahun 2024	3,91	4,08	104,35%		

Tabel 3.2 Capaian Sekretariat Badan Pengembangan SDM dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKASI KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	PRESENTASE REALISASI 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Komdigi Tahun 2024	40%	111,89%	279,73%
		Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Komdigi yang Dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024	30%	36,28%	120,93%

SK.1 Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Digital

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan (SK) tersebut perlu didukung oleh Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yaitu sebagai berikut:

IKSK 1.1. Persentase (%) Peserta yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Kementerian Komdigi yang Lulus Tepat Waktu

SK.1 Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika				
NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE REALISASI 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4/3)
1.	Persentase (%) Peserta yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Kementerian Komdigi yang Lulus Tepat Waktu	90% (3 Peserta dari total target 4 Peserta)	50% (2 Peserta dari total target 4 Peserta)	55,56%

Tabel 3.3 Persentase (%) Peserta yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Kementerian Komdigi yang Lulus Tepat Waktu

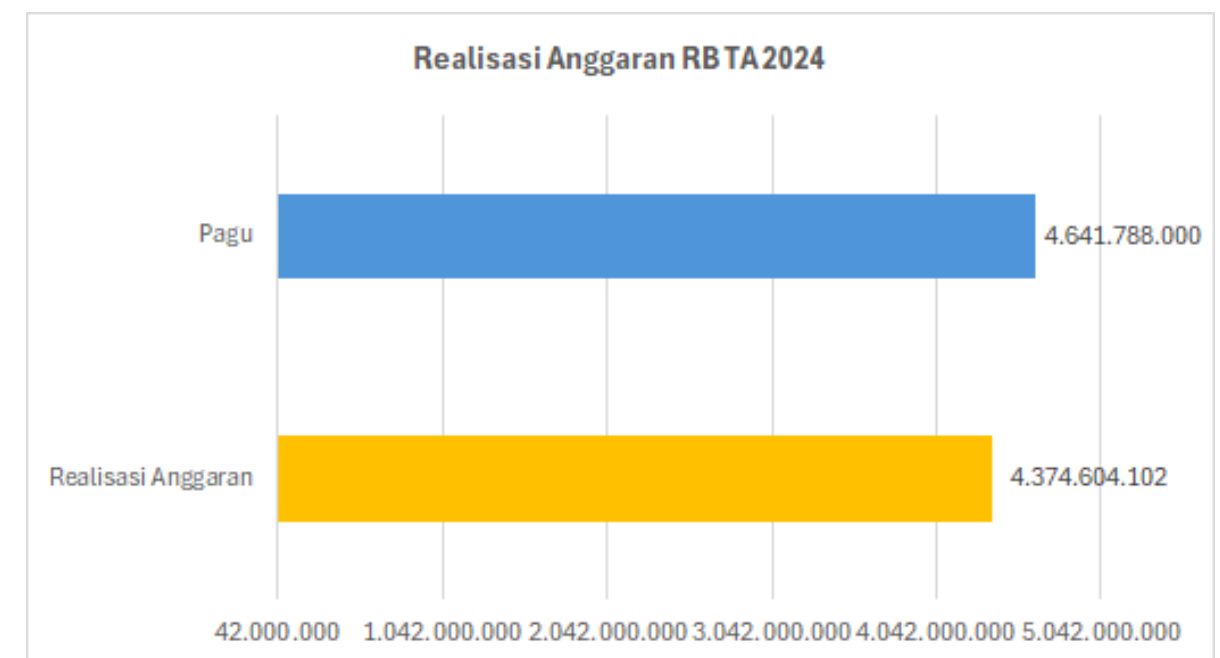
IKSK ini memberikan gambaran mengenai kelulusan tepat waktu bagi peserta penerima beasiswa S2 dan S3 internal Kementerian Komdigi pada tahun 2024. BPSDM Komdigi melalui Sekretariat Badan Pengembangan SDM menyelenggarakan program pemberian beasiswa S2 dan S3 untuk internal Kementerian Komdigi sebagai upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Komdigi

Oleh karena itu, melalui pelaksanaan IKSK ini, Sekretariat Badan Pengembangan SDM memastikan para penerima beasiswa pada lingkup Kementerian Komdigi berhasil menyelesaikan studinya sesuai dengan masa studi normal untuk setelahnya dapat kembali berkontribusi kepada unit kerja mereka masing-masing.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja IKSK Persentase (%) Peserta yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Kementerian Komdigi yang Lulus Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{penerima beasiswa yang lulus pada tahun berjalan (n) = 2}}{(\sum \text{penerima beasiswa yang seharusnya lulus (sesuai masa studi) di tahun berjalan (n) = 4})} \times 100\% = 50\%$$



Gambar 3.1 Realisasi Anggaran Persentase (%) Peserta yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Kementerian Komdigi

Pagu IKSK ini sebesar Rp 2.583.475.000 dengan realisasi anggaran Rp 2.582.475.419 (99,96%). Dengan kata lain, terdapat pagu Rp 999.581 (0,04%) anggaran yang belum terserap pada tahun 2024

Faktor Pendukung

Dukungan pengelola beasiswa baik internal maupun eksternal (mitra perguruan tinggi) serta koordinasi rutin dan berkala dalam memantau *progress* studi penerima beasiswa.

Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

Faktor Penghambat/Kendala

- Peserta tidak menyelesaikan perkuliahan tepat waktu karena tidak dapat menyelesaikan skripsi atau karya tulis ilmiah tepat waktu
- Peserta tidak dapat lulus tepat waktu karena terdapat masalah non teknis/pribadi penerima beasiswa (misal: sakit/hamil/sambil bekerja)
- Perubahan aturan/syarat kelulusan dari instansi/ perguruan tinggi terkait

Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

- Pemberian komponen pembiayaan untuk penerima beasiswa Dalam Negeri yaitu biaya publikasi ilmiah yang diberikan dengan reimburse dengan syarat, ketentuan, dan batasan nominal serta biaya tesis untuk penerima beasiswa Luar Negeri
- Mewajibkan para mahasiswa untuk memberikan laporan per 3 bulan untuk dapat memonitoring *progress* studi secara berkala
- Untuk bantuan biaya hidup di bulan terakhir bagi penerima beasiswa Luar Negeri akan diberikan setelah kepulangan ke Indonesia dengan melampirkan bukti tanggal penyelesaian studi atau sebelum kepulangan ke Indonesia dengan menandatangani SPTJM sebagai upaya agar penerima beasiswa tetap memberikan laporan kelulusannya
- Melakukan koordinasi intensif dengan mitra perguruan tinggi dan penerima beasiswa
- Monitoring berkala laporan perkembangan studi dengan Perguruan Tinggi
- Memiliki wadah komunikasi dengan Perguruan Tinggi maupun dengan mahasiswa, dan Monitoring secara berkala melalui *sharing session*

Rekomendasi

- Himbauan untuk mitra pengelola Program Beasiswa atau pihak Perguruan Tinggi untuk kiranya dapat membuat langkah pencegahan diantaranya berupa pemberian izin atau rekomendasi perubahan metode penelitian atau media pengumpulan data.
- Meningkatkan sosialisasi Program Beasiswa S2/S3 secara masif untuk meningkatkan jumlah pendaftar.

IKSK 1.2. Jumlah Penerima Program Beasiswa S2 dan S3 Internal Kementerian Komdigi

SK.1 MENINGKATNYA KOMPETENSI DAN KEMAMPUAN SDM NASIONAL BIDANG TIK				
NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE REALISASI 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4/3)
1.	Jumlah Penerima Program Beasiswa S2 dan S3 Internal Kementerian Komdigi	50 Orang	49 Orang	98%

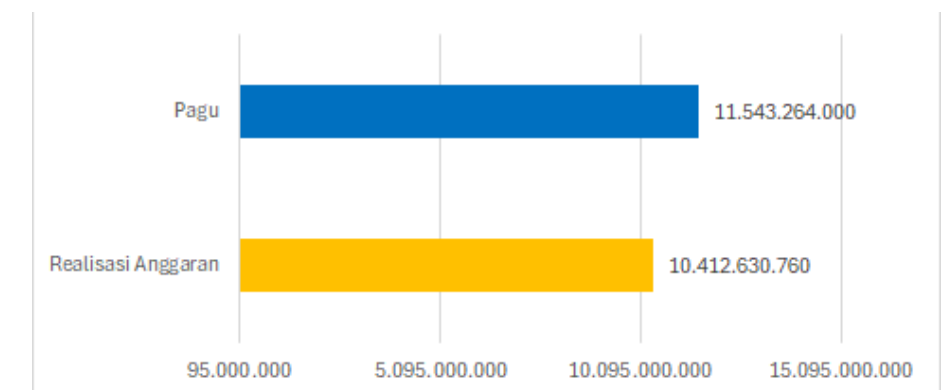
Tabel 3.4 Jumlah Penerima Program Beasiswa S2 dan S3 Internal Kementerian Komdigi

Dalam mendukung keberhasilan program Beasiswa S2 dan S3, Sekretariat Badan Pengembangan SDM turut menyelenggarakan program penerimaan Beasiswa S2 dan S3 pada lingkup internal Kementerian Komdigi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan, daya saing, dan inovasi di Kementerian Komdigi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, BPSDM Komdigi bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi ternama di dalam dan luar negeri.

Pada TA 2024, BPSDM Komdigi melalui Sekretariat Badan Pengembangan SDM telah melaksanakan proses seleksi penerimaan beasiswa S2 dan S3 lingkup internal yang dimulai pada bulan Juli 2024. Melalui proses seleksi tersebut, terdapat 49 orang yang berhasil diterima pada program penerimaan beasiswa S2 dan S3 internal TA 2024 dari total target penerimaan sebanyak 50 orang. Adapun metode perhitungan ataupun metode pengumpulan data capaian untuk IKSK ini melalui pengumpulan dokumen Surat Keputusan (SK) dari Kepala BPSDM Komdigi.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Sumber dana IKSK Jumlah Penerima Program Beasiswa S2 dan S3 Internal Kementerian Komdigi. Pagu IKSK ini sebesar Rp 11.543.264.000 dengan realisasi anggaran IKSK ini yaitu Rp 10.412.630.760 (90,21%). Oleh karena itu, terdapat Rp 1.130.633.240 (9,79%) sisa anggaran yang tidak terserap.



Gambar 3.2 Jumlah Penerima Program Beasiswa S2 dan S3 Internal Kementerian Komdigi Tahun 2024

Faktor Pendukung

Pengelolaan beasiswa dilaksanakan melalui kerjasama internal dan eksternal dengan mitra perguruan tinggi, disertai pemantauan rutin dan berkala terhadap Perkembangan akademik penerima beasiswa.

Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

Faktor Penghambat/Kendala

- Jadwal pendaftaran dari mitra perguruan tinggi yang berbeda menyebabkan ketidakteraturan dalam proses seleksi dan administrasi sehingga berpotensi menghambat jalannya program penerimaan beasiswa

Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

- Menjalin kerja sama yang baik dan erat dengan mitra dalam dan luar negeri

Rekomendasi

- Dukungan pengelola beasiswa S2/S3 internal dan mitra perguruan tinggi serta koordinasi rutin dan berkala dalam memantau *progress* studi penerima beasiswa.
- Untuk memperkaya literasi sekaligus peningkatan kompetensi digital, para penerima beasiswa dapat diarahkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dari program *Digital Talent Scholarship* (DTS) sesuai minat maupun kebutuhan instansi.

IKSK 2.1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPSDM Komdigi Tahun 2024

SK.1 MENINGKATNYA TATA KELOLA BPSDM Komdigi YANG BERSIH DAN EFISIEN				
NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE REALISASI 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4/3)
1.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPSDM Komdigi Tahun 2024	91	91	100%

Tabel 3.5 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPSDM Komdigi Tahun 2024

Terdapat perbedaan signifikan pada penilaian Reformasi Birokrasi (RB) tahun ini. Menurut Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, ada dua strategi utama untuk mencapai kebijakan RB Nasional 2020-2024, yaitu:

- Percepatan Birokrasi Digital: Melalui kebijakan percepatan dalam RB General untuk menciptakan birokrasi digital.
- Peningkatan Dampak Pelaksanaan RB: Menetapkan isu prioritas nasional dalam RB Tematik untuk mempercepat dampak pelaksanaan RB.

Secara umum pelaksanaan *RB General* dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan RB terdiri atas level makro dan meso. Sementara tingkatan Instansional disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro. Strategi level makro diarahkan kepada dua hal, yaitu mendorong percepatan digitalisasi birokrasi serta melaksanakan RB tematik



ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (RB)



Gambar 3.3 Arah Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)

untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah. Strategi pada level meso dilaksanakan untuk memastikan berbagai arahan kebijakan RB level makro yang ditetapkan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan utama yang efektif mencapai tujuan dan sasaran strategis RB.

Kementerian PANRB juga telah menyusun sembilan kebijakan birokrasi *digital* sebagai strategi utama. Kebijakan tersebut, yaitu Percepatan Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan *Agile*; Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional; Percepatan Transformasi Squad Model; Percepatan Implementasi SPBE melalui Pembangunan *SuperApps* Layanan Digital Pemerintah Terintegrasi; Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Mobilitas SDM ASN; Penguatan Kerja Kolaboratif (*collaborative working*) berbasis kinerja melalui SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah); Pembangunan MPP dan MPP *Digital Services*; Penguatan Pengawasan dengan *four line of defense*; serta Penguatan Kebijakan Publik berbasis bukti dengan *Big Data* dan *Artificial Intelligence*.

Padapenajaman *roadmap* juga diatur penyederhanaan indikator-indikator reformasi birokrasi. Penyederhanaan, integrasi, dan harmonisasi berbagai indikator RB dilakukan untuk menciptakan alat ukur yang konsisten, sederhana, namun fokus mengukur dampak. Lewat penyederhanaan indikator, instansi pemerintah tidak lagi disibukkan untuk mengisi dan menyiapkan data dukung untuk ribuan pertanyaan terkait RB. Harapannya instansi pemerintah bisa mengerahkan energinya untuk melaksanakan reform yang lebih substantif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan

pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

RB dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Dengan strategi RB yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi¹⁰.

[10] <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berkenalan-dengan-konsep-reformasi-birokrasi-general-dan-reformasi-birokrasi-tematik>

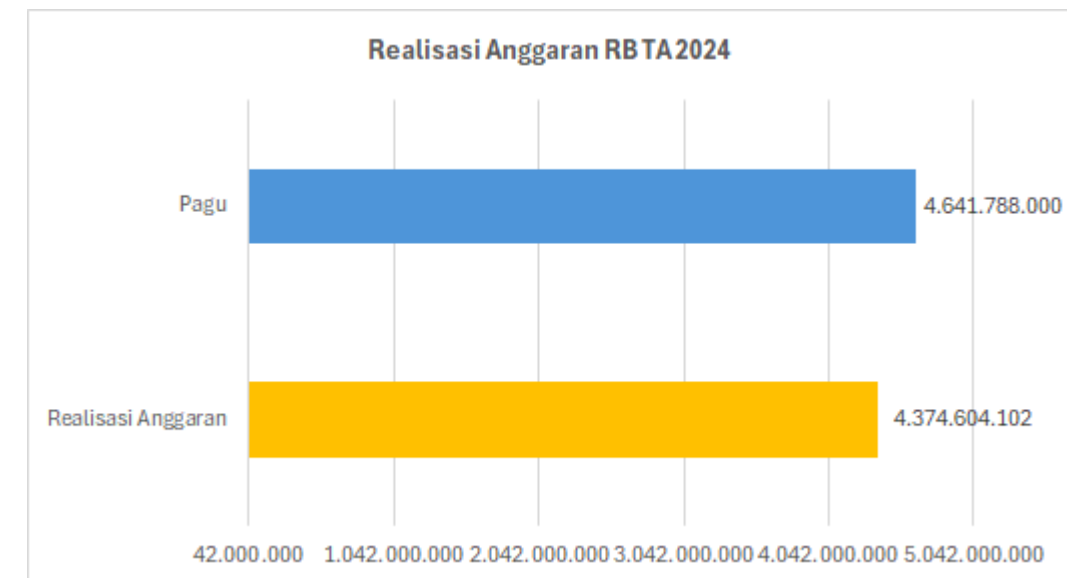
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Persentase capaian IKSK ini adalah 109,89% dengan membandingkan dari target awal IKSK ini yakni 100. Maka, capaian IKSK melebihi target yang semula ditetapkan dengan persentase capaian sebagai berikut:

$$\frac{(\Sigma \text{ Nilai RB BPSDM Komdigi Tahun 2024} = 100)}{\Sigma \text{ Target Nilai RB BPSDM Komdigi Tahun 2024} = 91)} \times 100\% = 109,89\%$$

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaannya, IKSK ini memiliki pagu sebesar Rp 4.641.788.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.374.604.102 atau sekitar 94,24% dari total pagu. Oleh karena itu, IKSK ini memiliki Rp 267.183.898 atau 5,76% sisa anggaran yang belum diserap. Namun apabila dibandingkan dengan karakteristik indikator kinerja yang berupa *outcome*, maka performa realisasi anggaran tersebut tidak menggambarkan secara langsung korelasi antara realisasi anggaran dan pencapaian kinerja.



Gambar 3.4 Realisasi Anggaran Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Faktor Pendukung

Terdapat beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja indikator ini, antara lain:

1. Saat ini BPSDM Komdigi melaksanakan RB Tematik Pengentasan Kemiskinan dan Pengendalian Laju Inflasi yang mana sejalan dengan *core bisnis* BPSDM Komdigi. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan dalam pencapaian target program *Digital Talent Scholarship (DTS)* juga akan mendorong kelancaran pelaksanaan dan capaian nilai RB.
2. Rencana aksi RB sudah di evaluasi dan disesuaikan dengan target DIPA sehingga mempermudah dalam mencapai target nilai RB.

Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

Faktor Penghambat/Kendala

- Terdapat perbedaan persepsi antara Sekretariat RB dengan Evaluator RB terkait langkah penyusunan renaksi.
- Laporan realisasi setiap Pokja DTS yang disusun hampir mendekati deadline realisasi RB Triwulan sehingga berpotensi mengurangi nilai RB karena bukti dukung yang di upload ke Portal RB Nasional.
- Dampak/*outcome* dari RB Tematik belum disusun secara berkala sehingga menyulitkan karena Tim Evaluasi melakukan permintaan secara mendadak.
- Tidak semua PIC dan perwakilan akademi / PIC PK hadir dalam rapat koordinasi sehingga realisasi capaian, hambatan yang dihadapi, dan bukti dukung dapat dinarasikan dengan baik.

Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

- Melakukan rapat koordinasi setiap Triwulan terutama dalam pengisian realisasi RB.
- Menetapkan deadline pengumpulan bukti data dukung RB Tematik dan pengisian pada Portal RB Nasional.
- Mengingatkan PIC dan perwakilannya terkait pentingnya koordinasi pencapaian realisasi RB agar dapat dihadiri oleh pegawai yang tepat.

Rekomendasi

1. Penyusunan capaian dampak/*outcome* RB Tematik secara berkala agar terlihat jelas dampak yang diberikan dan dirasakan oleh masyarakat
2. Sosialisasi dan koordinasi bahwa keberhasilan pencapaian RB bukan hanya tanggung jawab sebagian tapi merupakan tanggung jawab bersama.

IKSK 2.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) BPSDM Komdigi Tahun 2024

SK.2 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN				
NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE REALISASI 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4/3)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) BPSDM Komdigi Tahun 2024	72,85	74,80	100,68%

Tabel 3.6 Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) BPSDM Komdigi Tahun 2024

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di BPSDM Komdigi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Tujuan spesifiknya

adalah: (a) mengumpulkan informasi tentang penerapan SAKIP; (b) menilai pelaksanaan SAKIP; (c) menilai akuntabilitas kinerja; (d) memberikan rekomendasi perbaikan; dan (e) memantau tindak lanjut rekomendasi sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi meliputi kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas internal, serta capaian kinerja pada level kementerian dan unit kerja.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Persentase realisasi capaian IKSK ini adalah 102,68% dengan membandingkan realisasi Nilai AKIP 2024 sebesar 74,80 dengan target 2024 yaitu 72,85. Oleh karena itu, IKSK ini berhasil melampaui target yang diberikan.

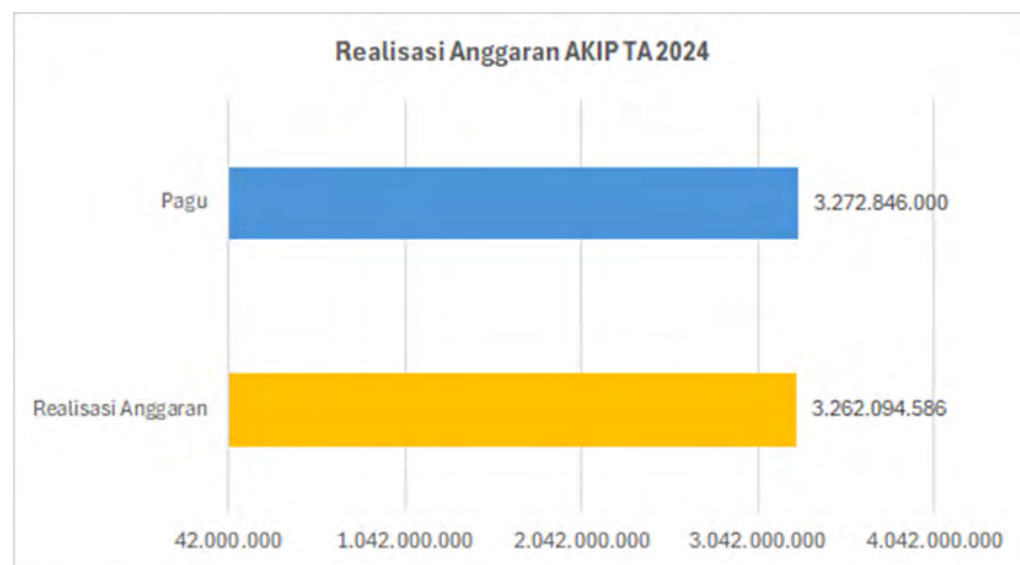
$$\text{Nilai AKIP} = 74,70$$

$$\text{Target} = 72,85$$

$$\times 100\% = 102,68\%$$

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaannya, IKSK 3.3 memiliki pagu sebesar Rp 3.272.846.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.262.094.586 atau sekitar 99,67%. Dengan kata lain, terdapat 0,33% sisa anggaran yang belum terserap atau sebesar Rp 10.751.414.



Gambar 3.5 Realisasi Anggaran Nilai AKIP Tahun 2024

Faktor Pendukung

Terdapat beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja indikator ini meliputi 4 (empat) komponen Manajemen Kinerja antara lain:

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (AKI)

Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

Faktor Penghambat/Kendala

- Dokumen Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dipublikasikan dengan tepat waktu
- Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam penyesuaian (Penambahan/pengurangan) tunjangan Kinerja/Penghasilan
- Laporan Kinerja belum sepenuhnya direviu secara berjenjang dengan memuat informasi perbandingan realisasi kinerja level nasional/internasional

Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

- Menyusun kebijakan internal kementerian yang mengatur implementasi Kinerja tema Pengentasan Kemiskinan
- Menetapkan target dalam Perjanjian Kinerja yang spesifik pada daerah yang termasuk miskin ekstrem sesuai data yang terdapat pada Kemenko PMK
- Menyusun Pengukuran kinerja dan melakukan evaluasi kinerja secara spesifik menasar kepada daerah yang termasuk miskin ekstrem sesuai pada data di Kemenko-PMK

- Evaluasi belum sepenuhnya dilakukan oleh SDM yang memadai

- Menyusun Laporan dan pertanggungjawaban kinerja dengan bukti dukung yang memadai secara berkala dan spesifik menasar pada daerah yang termasuk miskin ekstrem

Rekomendasi

1. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan pada Nota Dinas Penyampaian Laporan Penilaian AKIP BPSDM Komdigi Tahun 2024
2. Sosialisasi dan koordinasi bahwa keberhasilan pencapaian AKIP dan rekomendasi hasil penilaian AKIP kepada seluruh satuan kerja/UPT.

IKSK 2.3. Nilai Maturitas SPIP BPSDM Komdigi Tahun 2024

SK.2 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN				
NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE REALISASI 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4/3)
1.	Nilai Maturitas SPIP BPSDM Komdigi Tahun 2024	3,19	3,01	94,36%

Tabel 3.7 Nilai Maturitas SPIP BPSDM Komdigi Tahun 2024

Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang menyeluruh, dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Proses ini mencakup pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencerminkan tingkat kematangan

dan efektivitas pengendalian internal di instansi pemerintah. Maturitas SPIP diukur berdasarkan sejauh mana pengendalian internal diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Penilaian ini melibatkan evaluasi terhadap kebijakan, prosedur, serta implementasi pengendalian yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja.

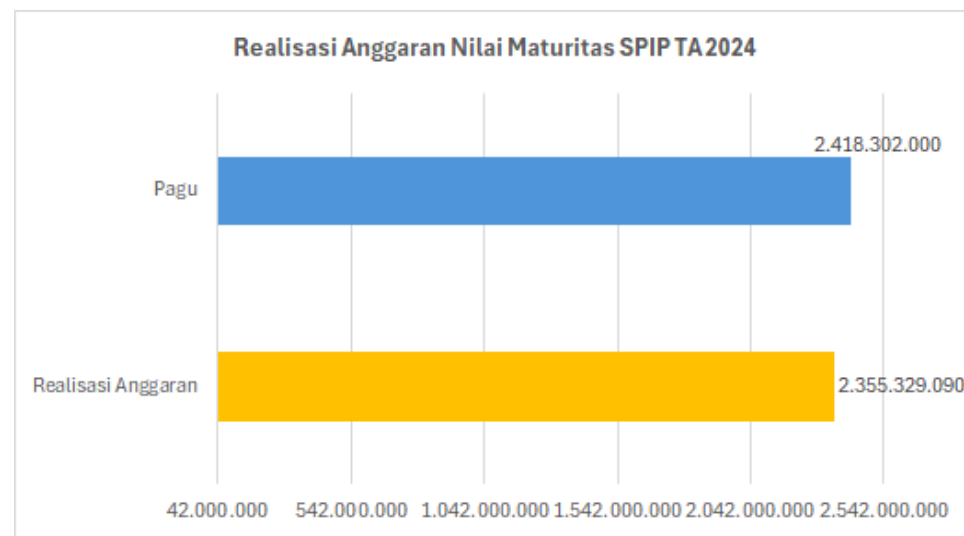
Perbandingan antara Target dan Realisasi Fisik

Pada tahun 2024, BPSDM Komdigi berhasil meraih nilai SPIP sebesar 3,005. Oleh karena itu, apabila membandingkan realisasi capaian kinerja tersebut dengan target SPIP BPSDM Komdigi Tahun 2024 sebesar 3,01, maka BPSDM Komdigi berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi Perbandingan target dan realisasi kinerja untuk indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai SPIP} = 3,005}{\text{Target} = 3,01} \times 100\% = 94,36\%$$

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaannya, IKS 2.3 memiliki pagu sebesar Rp 2.418.302.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.355.329.090 atau sekitar 97,40% dari total pagu. Masih terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp 62.972.910 atau sekitar 2,60% dari total pagu.



Gambar 3.6 Realisasi Anggaran Nilai Maturitas SPIP tahun 2024

Faktor Pendukung

Komponen penilaian SPIP diantaranya:



Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

Faktor Penghambat/Kendala

- Penetapan tujuan rincian *output* terdapat Rincian *Output* (RO) yang tidak relevan dengan sasaran kegiatan
- BPSDM Komdigi belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan terkait aturan pengelolaan SDM
- BPSDM Komdigi secara umum telah melakukan analisis risiko sampai dengan rencana tindak pengendalian

Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

- Memastikan kembali perencanaan kinerja seluruhnya sudah berorientasi hasil (*outcome*) pada levelnya dengan melakukan perbaikan kualitas perencanaan terutama kualitas perencanaan kegiatan dan rincian *output* agar sesuai dengan mandat serta mendukung sasaran kegiatan
- Meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang belum memadai sehingga pegawai yang memiliki pemahaman terkait manajemen risiko dapat meningkatkan pemahamannya
- BPSDM Komdigi perlu meningkatkan implementasi atas tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja agar dapat menurunkan level risiko

Rekomendasi

1. Memastikan kembali perencanaan kinerja seluruhnya sudah berorientasi hasil (*outcome*) pada levelnya dengan melakukan perbaikan kualitas perencanaan terutama kualitas perencanaan kegiatan dan rincian *output* agar sesuai dengan mandat serta mendukung sasaran kegiatan.
2. Menyempurnakan penjabaran kinerja dengan kerangka logis yang

mendasarinya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan dan rincian *output* yang dilaksanakan berfokus dan saling berkaitan dengan sasaran organisasi serta menetapkan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran kinerja pada perencanaan selanjutnya.

3. Menyusun standar kompetensi untuk seluruh jabatan dan posisi dalam struktur organisasi Badan

- Melakukan Pengelolaan SDM sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang ditetapkan serta dilakukan sebagai upaya penanganan risiko yang mungkin disebabkan oleh kelemahan SDM.
- Menerapkan pemisahan fungsi untuk transaksi keuangan maupun

pengadaan barang/jasa serta melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan kebijakan pemisahan fungsi mengingat adanya ADTT yang berkaitan dengan ketidacermatan dalam penerapan pemisahan fungsi atas transaksi keuangan.

IKSK 2.4. Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Komdigi Tahun 2024

SK.2 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN				
NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE REALISASI 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4/3)
1.	Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Komdigi Tahun 2024 (eksisting 2023: 96,17 atau Sangat Baik)	93,69	96,18	102,66%

Tabel 3.8 Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Komdigi Tahun 2024

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian atas kinerja anggaran Badan Pengembangan SDM Komdigi Tahun 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan nilai evaluasi kinerja anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Hingga tahun 2024, Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Komdigi Tahun 2024 sebesar 94,45%. Namun, nilai tersebut masih belum nilai sempurna karena hingga saat ini aplikasi SMART yang dikelola oleh Kementerian Keuangan masih dalam tahap pengembangan/penyempurnaan.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran diperoleh berdasarkan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran pada aplikasi SMART dengan bobot sebesar 50% dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada aplikasi OM SPAN dengan bobot sebesar 50%. Adapun Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSDM Komdigi pada aplikasi OMSPAN sebesar 94,28 (bobot 50%: 47,14) dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSDM Komdigi pada aplikasi SMART sebesar 98,08 (bobot 50%: 49,04).

Perhitungan realisasi kinerja untuk indikator ini adalah:

$$\text{Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (bobot 50\%)} + \text{Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (bobot 50\%)} = 96,18$$

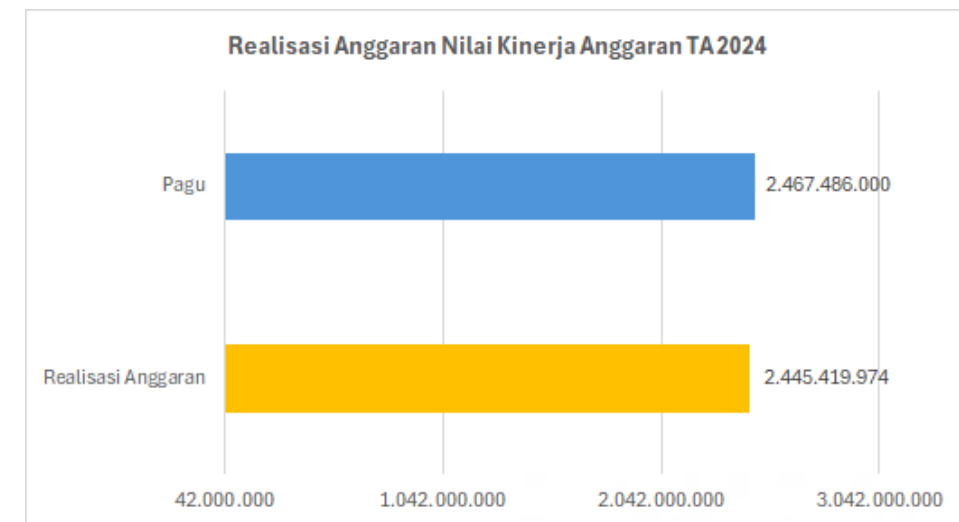
$$47,14 + 49,04 = 96,18$$

Oleh karena itu, perbandingan antara realisasi kinerja dengan target 2024 pada IKSP ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Tahun 2024} = 96,18}{\text{Target Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Tahun 2024} = 93,69} \times 100\% = 102,66\%$$

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaannya, IKSK 2.4 memiliki pagu sebesar Rp 2.467.486.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.445.419.974 atau sekitar 99,11% pada TA 2024. Oleh karena itu, sisa anggaran untuk IKSK ini sebesar Rp 22.066.026 (0,89%).



Gambar 3.7 Realisasi Anggaran Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024

Faktor Pendukung

- Hampir seluruh Capaian *Output* pada seluruh Satker/UPT berhasil tercapai secara maksimal.
- Satker/UPT melakukan revisi anggaran tepat waktu dan tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Satker/UPT.
- Rata-rata nilai realisasi anggaran per triwulan di seluruh Satker/UPT masih *on track* atau sesuai dengan target triwulan dari Kementerian Keuangan.
- Pengelolaan belanja kontraktual, penyelesaian tagihan belanja kontraktual, pengelola UP dan TUP sudah baik.

Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

Faktor Penghambat/Kendala

- Satker/UPT belum maksimal dalam mengaplikasikan Standar Biaya Khusus (SBK) pada perencanaan anggaran.
- Kesalahan pencatatan RPD halaman III DIPA pada awal tahun 2024. Hal tersebut menyebabkan nilai RPD lebih besar daripada realisasi anggaran beberapa Satker/UPT.
- Penyerapan anggaran sering kali tidak merata dan belum sesuai dengan target yang disepakati oleh Kepala BPSDM Komdigi dengan Kepala Satker/UPT. Salah satu faktor penyebabnya karena terdapat blokir pagu di beberapa Satker/UPT yang membuat penyerapan anggaran meningkat drastis di TW III dan IV TA 2024.

Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

- Mengadakan rapat koordinasi setiap bulan dengan PPK untuk membahas realisasi anggaran dan capaian *output*. Menjelang TW III, koordinasi dilakukan 2 minggu sekali, baik *offline* ataupun *online*.
- Mendorong Satker/UPT untuk melakukan revisi halaman III DIPA setiap triwulan untuk menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan 3 bulan ke depan.

Rekomendasi

1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, BPSDM Komdigi berkomitmen untuk meningkatkan dan menelaraskan pelaksanaan Rencana Program Dan Anggaran (RPD). Hal ini bertujuan untuk meminimalkan deviasi antara rencana dan realisasi anggaran, serta memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
2. Diperlukan penyamaan persepsi terkait dengan RPD Halaman III DIPA yang terdapat di SAKTI agar menyesuaikan proyeksi pelaksanaan yang terfokus pada satu triwulan yang sedang berjalan terlebih dahulu dengan deviasi kurang lebih 5%.

IKSK 2.5. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) BPSDM Komdigi Tahun 2024

SP.2 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN				
NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE REALISASI 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4/3)
1.	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) BPSDM Komdigi Tahun 2024	90	95	105,56%

Tabel 3.9 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) BPSDM Komdigi Tahun 2024

Indikator ini dilaksanakan sebagai salah satu Indikator Kinerja pada Eselon I untuk memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran. Adapun untuk sumber data indikator ini yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Kementerian Komdigi dan Hasil Penilaian Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja (Satker) selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Pada Tahun 2024, Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAPPA-EI BPSDM Tahun 2024 adalah 95,00.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Berdasarkan hasil Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan dari Biro Keuangan Kementerian Komdigi, nilai UAPPA-EI Tahun 2024 yang berhasil diperoleh BPSDM Komdigi adalah 95 dari target 2024 sebesar 90. Penilaian tersebut dilakukan atas kualitas pelaporan keuangan TA 2023 yang dilakukan secara berjenjang menggunakan parameter Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan TA 2023, Nota Kesepakatan Angka Asersi final LKKL TA 2023, dan Laporan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) TA 2023.

Adapun persentase realisasi perbandingan target dengan realisasi kinerja untuk indikator ini adalah sebagai berikut:

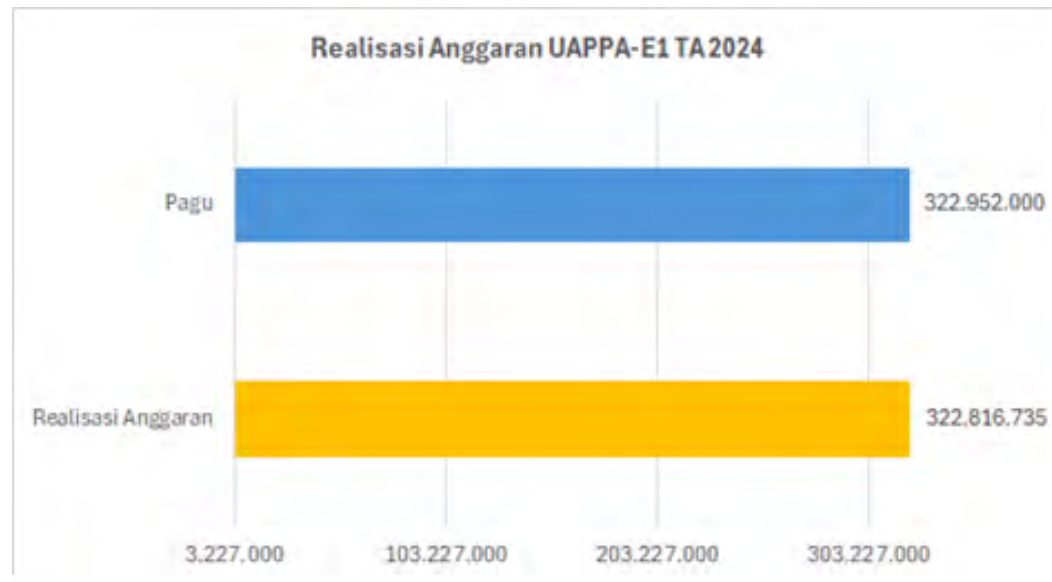
$$\text{Nilai UAPPA - EI} = 95$$

$$\text{Target 2024} = 90$$

$$\frac{95}{90} \times 100\% = 105,56\%$$

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaannya, IKS 2.5 memiliki pagu sebesar Rp 322.952.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 322.816.735 atau sekitar 99,96% pada TA 2024. Sehingga indikator ini memiliki sisa anggaran sebesar Rp 135.265 (0,04%).



Gambar 3.8 Realisasi Anggaran UAPPA-E1 Tahun 2024

Faktor Pendukung

Keberhasilan penilaian indikator UAPPA-E1 didukung oleh kualitas pelaporan keuangan di tingkat Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran dengan sumber data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Kementerian Komdigi dan Hasil Penilaian Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja (Satker) selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

Tidak ada penghambat/Kendala yang signifikan dalam ketercapaian target yang telah ditetapkan.

Rekomendasi

Perlu meningkatkan kualitas Laporan Keuangan TA 2024 dengan berkomitmen untuk melaksanakan anggaran dan menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IKSK 2.6. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BPSDM Komdigi Tahun 2024

SP.2 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN				
NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE REALISASI 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4/3)
1.	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) BPSDM Komdigi Tahun 2024	98	97,27	99,20%

Tabel 3.10 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BPSDM Komdigi Tahun 2024

Untuk memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), maka indikator kinerja ini masuk sebagai salah satu indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Pengembangan SDM Komdigi. Nilai kualitas pelaporan keuangan di tingkat satker yang diukur berdasarkan 2 komponen penilaian yaitu Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang. Pada Tahun 2024, Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA BPSDM adalah 97,27.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Apabila membandingkan realisasi capaian kinerja UAKPA BPSDM Komdigi sebesar 97,27 dengan target 2024 sebesar 98, maka persentase perbandingan antara target dan realisasi kinerja untuk indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai UAKPA} = 97,27}{\text{Target} = 98} \times 100\% = 99,26\%$$

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaannya, tidak ada pagu yang spesifik dialokasikan untuk indikator ini. Pelaksanaan kegiatan untuk menunjang pencapaian kinerja indikator ini dilakukan dengan menggunakan anggaran dari berbagai RO atau Komponen yang dapat dimanfaatkan.

Faktor Pendukung

Ketercapaian nilai kualitas pelaporan keuangan di level Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA) didukung oleh keberhasilan dalam memenuhi komponen penilaian kualitas laporan keuangan UAKPA yang telah ditentukan oleh Biro Keuangan Kementerian Komdigi.

Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

Tidak ada penghambat/Kendala yang signifikan dalam ketercapaiannya.

Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, perlu dilakukan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 melalui komitmen pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IKSK 2.7. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Komdigi Tahun 2024

SK.2 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN				
NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4/3)
1.	Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Komdigi Tahun 2024	1%	0,09%	9%

Tabel 3.11 Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Komdigi Tahun 2024

Batas kewajaran atas nilai temuan material dalam pengelolaan keuangan yang dapat mempengaruhi pencapaian opini WTP KemKomdigi atas Laporan Keuangan BPSDM Komdigi TA 2023 dengan sumber data Laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPSDM Komdigi TA 2023.

Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Komdigi Tahun 2024 dilakukan dengan metode:

$$\frac{\text{Nilai temuan pengembalian ke kas negara LHP BPK atas LK BPSDM Komdigi TA 2023}}{\text{Total realisasi anggaran BPSDM Komdigi TA 2023}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, terdapat beberapa nilai temuan di BPSDM Komdigi yang harus dikembalikan ke kas negara, yaitu:

1. BBPSDMP Makassar: kelebihan pembayaran atas jasa konsultan pengawasan pembangunan gedung kantor BBPSDMP Makassar sebesar Rp 77.976.000 dan atas konstruksi pembangunan gedung kantor BBPSDMP Makassar sebesar Rp 256.012.581 (total temuan: Rp 333.988.581)

2. STMM Yogyakarta: pekerjaan konstruksi renovasi gedung perkuliahan di STMM Yogyakarta tidak selesai dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 38.303.921 dan rekomendasi BPK lebih Cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan di lingkungannya dan m e m p e r t a n g g u n g j a w a b k a n kekurangan pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp 160.609.800 (total temuan: Rp 198.913.721)

Berdasarkan temuan tersebut, maka total temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Tahun 2023 yaitu: Rp 532.902.302. Oleh karena itu, capaian dari indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Rp 532.902.302}}{\text{Rp 576.283.345.000}} \times 100\% = 0,09\%$$

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Indikator ini menggunakan metode polarisasi capaian semakin kecil nilai, maka semakin baik capaiannya. Oleh karena itu, apabila membandingkan realisasi capaian kinerja indikator ini sebesar 0,09% dengan target 2024 sebesar $\leq 1\%$, maka temuan nilai material dalam pengelolaan keuangan atas LK BPSDM Komdigi TA 2023 masih dalam batas kewajaran karena kurang dari 1%.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaannya, tidak ada pagu yang spesifik dialokasikan untuk indikator ini. Pelaksanaan kegiatan untuk menunjang pencapaian kinerja indikator ini dilakukan dengan menggunakan anggaran dari berbagai RO atau komponen yang dapat dimanfaatkan.

Faktor Pendukung

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan BPSDM Komdigi TA 2023, terdapat 4 nilai temuan di 2 Satker/UPT yang harus dikembalikan ke kas negara. Penjumlahan 4 nilai temuan tersebut masih kurang dari

1% atau masih dalam batas kewajaran BPK.

Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

Tidak ada faktor penghambat/kendala yang signifikan dalam proses pelaksanaan pengembalian nilai temuan ke kas negara.

Rekomendasi

Koordinasi intens dan baik antara Sekretariat Badan Pengembangan SDM dan seluruh Satker/UPT dengan Inspektorat Jenderal dan BPK dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

IKSK 2.8. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di BPSDM Komdigi pada Tahun 2024

SK.2 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN				
NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4/3)
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di BPSDM Komdigi pada Tahun 2024	70%	100%	142,86%

Tabel 3.12 Persentase (%) Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di BPSDM Komdigi pada Tahun 2024

Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2024 (atas LHP yang keluar pada tahun 2024) yang selesai ditindaklanjuti dengan sumber data Laporan pemantauan TLHP BPK (apabila sampai dengan batas waktu penerbitan LAKIP belum diterbitkan laporan, maka memakai laporan hasil rekon internal oleh APIP bagian TLHP BPSDM Komdigi).

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Metode perhitungan untuk indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di BPSDM Komdigi Tahun 2024 dilakukan dengan metode:

$$\frac{\text{(Total tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan BPK pada tahun 2024 (atas LHP yang keluar pada tahun 2024) yang selesai ditindaklanjuti)}}{\text{(Total rekomendasi BPK Tahun 2024 (atas LHP yang keluar pada tahun 2024))}}$$

$$\times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, terdapat beberapa temuan di BPSDM Komdigi pada LHP yang keluar di tahun 2024, yaitu:

1. BBPSDMP Makassar: kelebihan pembayaran atas jasa konsultan pengawasan pembangunan gedung kantor BBPSDMP Makassar sebesar Rp 77.976.000 dan atas konstruksi pembangunan gedung kantor BBPSDMP Makassar sebesar Rp 256.012.581 (total temuan: Rp 333.988.581)
2. STMM Yogyakarta: pekerjaan konstruksi renovasi gedung

perkuliahan di STMM Yogyakarta tidak selesai dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 38.303.921 dan rekomendasi BPK lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan di lingkungannya dan mempertanggungjawabkan kekurangan pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp 160.609.800 (total temuan: Rp 198.913.721)

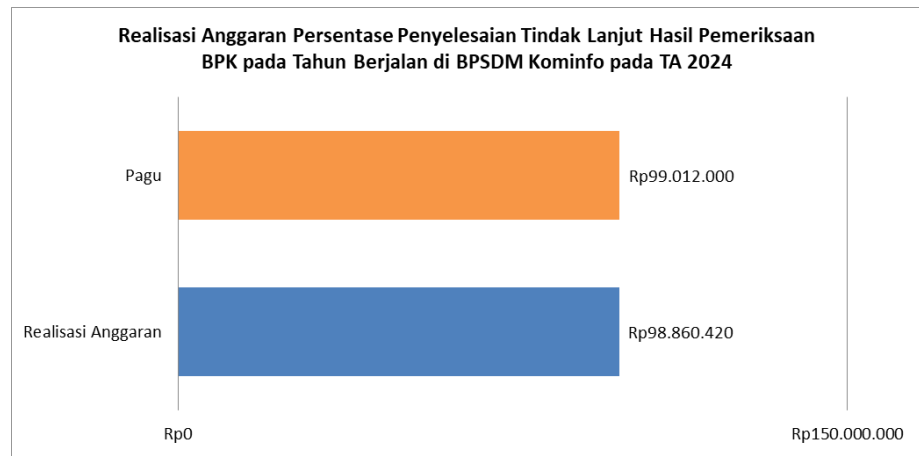
3. Konsep Temuan Pemeriksaan dengan judul temuan Keterlambatan Penyetoran Pajak sebesar Rp 6.973.556.824 atas Transaksi Belanja melalui Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) Hingga Desember 2024, seluruh temuan tersebut sudah berhasil/selesai ditindaklanjuti. Oleh karena itu, capaian untuk indikator ini yaitu:

$$\frac{5 \text{ (rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti)}}{5 \text{ (total rekomendasi BPK Tahun 2024)}} \times 100\% = 100\%$$

$$\times 100\% = 100\%$$

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaannya, IKSK 2.8. memiliki pagu sebesar Rp 99.012.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 98.860.420 atau sekitar 99,84% pada TA 2024. Masih terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp 151,580 (0,15%) yang masih belum terealisasi pada Triwulan IV 2024.



Gambar 3.9 Realisasi Anggaran Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di BPSDM Komdigi pada Tahun 2024

Faktor Pendukung

Dokumen TLHP telah disampaikan ke BPK sesuai dengan rencana aksi yang sudah disusun dan disampaikan melalui Inspektorat Jenderal (melalui aplikasi SIMWAS) untuk kemudian mendapat validasi persetujuan.

Tidak ada faktor penghambat/kendala yang signifikan dalam proses TLHP BPK pada tahun berjalan di BPSDM Komdigi.

Rekomendasi

Koordinasi intens dan baik antara Sekretariat Badan Pengembangan SDM dan seluruh Satker/UPT dengan Inspektorat Jenderal dan BPK dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

IKSK 2.9. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di BPSDM Komdigi pada Tahun 2024

SK.2 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN				
NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4/3)
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di BPSDM Komdigi pada Tahun 2024	30%	0%	0%

Tabel 3.13 Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di BPSDM Komdigi pada Tahun 2024

Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya (atas LHP yang keluar pada tahun ≤ 2023) yang telah selesai ditindaklanjuti dengan sumber data yaitu Laporan TLHP BPK.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Metode perhitungan untuk indikator

$$\frac{\text{Total Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan BPK Tahun Sebelumnya atas LHP yang keluar ≤ 2023}}{\text{Total Rekomendasi BPK Tahun ≤ 2023}} \times 100\% = 100\%$$

Pada lingkup BPSDM Komdigi, terdapat rekomendasi temuan yang belum selesai ditindaklanjuti/belum sesuai yaitu di Pusdiklat atas kelebihan pembayaran renovasi gedung Pusdiklat Meruya sebesar Rp 166.867.997. Hal tersebut dikarenakan timbulnya permasalahan hukum di internal pihak ke-3 yaitu PT. Marvic Lumongga Indah yang membuat proses pengembalian nilai temuan ke kas negara menjadi tersendat.

Selama kurun waktu 2024, Pusdiklat telah mengupayakan tindak lanjut terkait dengan temuan tersebut, diantaranya yaitu:

1. Koordinasi antara PPK Pusdiklat dengan Direktur PT. Marvic Lumongga Indah terkait tindak lanjut hasil temuan;
2. Mengadakan rapat bersama dengan perwakilan Inspektorat Jenderal, BPK, dan Sekretariat Badan Pengembangan SDM terkait

dengan tindak lanjut hasil temuan dan menghasilkan Nota Dinas terkait langkah yang harus ditempuh oleh PPK Pusdiklat, yaitu:

- a. Melakukan pemantauan dan koordinasi proses hukum yang sedang berjalan, serta memastikan bahwa tuntutan yang diajukan oleh PT. Marvic Lumongga Indah sudah dapat memuat hal yang menjadi rekomendasi BPK;
- b. Melakukan verifikasi secara internal atas legalitas PT. Marvic Lumongga Indah dengan dapat memanfaatkan fasilitas layanan Administrasi Hukum Online (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, penelusuran administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, serta upaya penelusuran lainnya yang relevan;
- c. Melaporkan secara berkala progres penyelesaian pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK kepada

Oleh karena itu, capaian untuk indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ (total rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti atas LHP yang keluar ≤ 2023)}}{1 \text{ (total Rekomendasi BPK Tahun ≤ 2023)}} \times 100\% = 0\%$$

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Tidak ada Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Faktor Pendukung

Meski proses pengembalian nilai temuan ke kas negara mengalami hambatan, namun Pusdiklat bersama Sekretariat Badan Pengembangan SDM terus melakukan koordinasi untuk memantau *progress* TLHP.

Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

Tidak ada faktor penghambat/kendala yang signifikan dalam proses TLHP BPK pada tahun berjalan di BPSDM Komdigi.

Rekomendasi

Koordinasi lebih intens baik antara Sekretariat Badan Pengembangan SDM dan Pusdiklat dengan Inspektorat Jenderal dan BPK dalam melaporkan *progress* TLHP BPK.

IKSK 2.10. Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Telaah Hukum dan Kerjasama di BPSDM Komdigi Tahun 2024

SK.2 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN				
NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4/3)
1.	Persentase Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Telaah Hukum dan Kerjasama di BPSDM Komdigi Tahun 2024	100%	825%	825%

Tabel 3.14 Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Telaah Hukum dan Kerjasama di BPSDM Komdigi pada Tahun 2024

Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Telaah Hukum dan Kerjasama di BPSDM Komdigi dengan target 25 dokumen dengan Penyusunan naskah dokumen kerja sama, koordinasi dengan satuan kerja terkait kebutuhan kerja sama dengan calon mitra. Sumber data indikator ini adalah Laporan hasil Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kerja sama.

Penyusunan naskah dokumen

kerja sama, koordinasi dengan satuan kerja terkait kebutuhan kerja sama dengan calon mitra melalui beberapa kegiatan dengan Realisasi Capaian Rancangan Perundang-Undangan dan Kerja Sama yang Difasilitasi sebanyak 213 Dokumen.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Realisasi Perbandingan target dan realisasi kinerja untuk indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Rancangan Perundang-undangan dan Kerjasama yang di Fasilitas} = 213}{\text{Target} = 25} \times 100\% = 825\%$$

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Tidak ada Pagu anggaran dan Realisasi Anggaran

Faktor Pendukung

Penyusunan naskah dokumen kerja sama dilakukan melalui kegiatan koordinasi dengan satuan kerja terkait untuk memenuhi kebutuhan kerjasama dengan calon mitra strategis.

Faktor Penghambat/Kendala

- Terdapat permasalahan hukum di internal PT. Marvic Lumongga Indah yang menghambat proses pengembalian nilai temuan ke kas negara.

Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

- Memantau proses hukum di PT. Marvic Lumongga Indah dan melaporkan secara berkala progres penyelesaian TLHP BPK kepada Inspektorat Jenderal drastis di TW III dan IV TA 2024.



Pada tahun 2024, banyak dokumen kerja sama yang sudah *expired* sehingga harus difasilitasi untuk pengajuan dokumen baru. Selain itu, pada tahun 2024 juga terdapat banyak pengajuan kerja sama, seperti kerja sama untuk pelatihan akademi VSGA dengan skema baru.

Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

Tidak ada kendala yang signifikan dalam pencapaian target tersebut

Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sama dan mencapai tujuan bersama, diperlukan peningkatan koordinasi antara satuan kerja terkait dan calon mitra. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi bilateral

yang efektif dan efisien. Selain itu, perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau implementasi dokumen kerjasama dan memastikan kesesuaian dengan tujuan yang ditetapkan.

IKSK 2.11. Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen BPSDM Komdigi Tahun 2024

SK.2 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN				
NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4/3)
1.	Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen BPSDM Komdigi Tahun 2024	3,91	4,08	104,35%

Tabel 3.15 Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen BPSDM Komdigi Tahun 2024

Pengukuran Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Internal Sekretariat Badan Pengembangan SDM Komdigi pada tahun 2024, yang bertujuan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan layanan yang

berkesinambungan pada Sekretariat Badan Pengembangan SDM dengan fungsi dari masing-masing bidang di antaranya:

1. Layanan bidang Program, Evaluasi serta kerja sama dilakukan melalui

koordinasi dengan Setjen, Bappenas, Kemenkeu, Kemenpan RB, K/L, Pemda atas seluruh proses pencapaian indikator.

2. Layanan bidang Keuangan dan Rumah Tangga dilakukan melalui koordinasi dengan Setjen dan Kemenkeu atas seluruh proses pencapaian indikator.
3. Layanan bidang Kepegawaian dan Tata Usaha dilakukan melalui koordinasi dengan Setjen, BKN, KemenpanRB, dan BPKP atas seluruh proses pencapaian indikator.
4. Layanan bidang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan Setjen dan BPK atas seluruh proses pencapaian indikator

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Hasil survei Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen BPSDM Komdigi Tahun 2024 = 4,08

$$\frac{4,08}{\text{Target} = 3,91} \times 100\% = 104,35\%$$

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Tidak ada Pagu anggaran dan Realisasi Anggaran

Faktor Pendukung

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan mencapai standar kinerja yang ditetapkan, kami berkomitmen untuk memahami

Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen BPSDM Komdigi Tahun 2024, BPSDM Komdigi berhasil memperoleh nilai sebesar 4,08 dengan kategori Puas dari target 2024 sebesar 3,91. Hasil nilai tersebut diperoleh melalui penilaian terhadap beberapa layanan, yaitu:

1. Layanan Review Dokumen Kerja Sama dengan nilai 4,16 (Puas)
2. Layanan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran dengan nilai 4,27 (Sangat Puas)
3. Layanan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Pegawai dengan nilai 3,84 (Puas)
4. Layanan Pengelolaan Gaji Pegawai dengan nilai 4,20 (Puas)
5. Layanan Surat Kabar dengan nilai 4,07 (Puas)
6. Layanan Peminjaman Koleksi Buku Tercetak dengan nilai 4,20 (Puas)

kebutuhan dan preferensi pelanggan secara mendalam, membangun hubungan yang lebih kuat dan efektif antara pengguna layanan dan pemberi layanan, meningkatkan kualitas layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan memenuhi standar Reformasi Birokrasi dan Perjanjian Kinerja pimpinan.

Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

Tidak ada kendala yang signifikan dalam pencapaian target

Rekomendasi

BPSDM Komdigi perlu meningkatkan beberapa hal agar dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen BPSDM Komdigi Tahun 2024 diantaranya:

1. Aplikasi perlu menambahkan fitur yang lebih menarik dengan standar keamanan yang baik.
2. Perlu melaksanakan monitoring pada Aplikasi secara berkala dan selalu *update* data terbaru.
3. Integrasi data Kementerian Komdigi dengan sistem atau aplikasi yang diinginkan.
4. Meningkatkan layanan koneksi internet untuk mendukung proses pelayanan di lingkungan sekretariat.

IKSK 2.12. Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Komdigi Tahun 2024

SK.2 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN				
NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4/3)
1.	Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Komdigi Tahun 2024	Min. 40% (dari total Nilai Anggaran Belanja Barang/ Jasa)	111,89%	279,73%

Tabel 3.16 Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Komdigi Tahun 2024

Indikator ini mengukur realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa lingkup Badan Pengembangan SDM Komdigi Tahun 2024. Pelaksanaan indikator ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka

menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun berdasarkan Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan Kinerja Anggaran Kementerian Komunikasi

dan Digital Periode s.d. Bulan Desember tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan Kementerian Komunikasi dan Digital, dan data capaian belanja PDN dan UMKM dari Biro Umum Kementerian Komunikasi dan Digital, pada tahun 2024 Badan Pengembangan SDM Komdigi telah menggunakan PDN dan Produk UMKM sebesar Rp 323.815.528.943 dari total Pagu Belanja Pengadaan Barang/Jasa BPSDM Komdigi yaitu Rp 413.477.167.100 dengan total Nilai Komitmen Belanja Rp 289.418.128.342.

Berdasarkan arahan dari Biro Umum Kementerian Komdigi, metode perhitungan untuk indikator ini yaitu Pembayaran Belanja PDN yang dibagi dengan Komitmen Belanja PDN. Berdasarkan data pada aplikasi *BigBox*, realisasi pembayaran PDN BPSDM Komdigi pada tahun 2024 sebesar Rp 323.815.528.943 yang terdiri atas belanja PDN Rp 272.619.000.251 dan belanja UMKM Rp 51.196.528.692.

Metode perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

$$\frac{\text{Pembayaran Belanja PDN (termasuk UMKM) = Rp 323.815.528.943}}{\text{Komitmen Belanja PDN = Rp 289.418.128.342}} \times 100\% = 111,89\%$$

Oleh karena itu, apabila realisasi kinerja tersebut dibandingkan dengan target tahun 2024 indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\% \text{Capaian 2024} = 111,89\%$$

$$\% \text{Target 2024} = 40\%$$

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Tidak ada Pagu anggaran dan Realisasi Anggaran.

Faktor Pendukung

1. Kebijakan dan regulasi yang mendukung. Adanya regulasi yang mewajibkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pemberdayaan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa serta penyusunan anggaran yang

mengutamakan belanja untuk Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM.

2. Komitmen Pejabat di lingkungan BPSDM Komdigi dalam merealisasikan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM sebesar Rp 289.418.128.342 atau 70,00% dari Pagu Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Implementasi sistem elektronik dan digitalisasi seperti penggunaan eKatalog yang mempercepat proses pengadaan serta integrasi

sistem monitoring berbasis teknologi yang mendukung pelacakan yang akurat terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri melalui SAKTI.

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan secara berkala untuk memastikan keterpenuhan target penggunaan Produk Dalam Negeri dan UMKM.

Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

Faktor Penghambat/Kendala

- Keterbatasan kapasitas produksi dalam negeri untuk memenuhi volume atau kapasitas yang dibutuhkan untuk pengadaan di BPSDM.
- Keterbatasan teknologi dan inovasi produk dalam negeri yang belum kompetitif dari segi kualitas dan inovasi dibandingkan produk impor.
- Harga produk dalam negeri yang kurang kompetitif dibandingkan produk luar negeri serta kurangnya insentif harga yang signifikan terhadap Produk Dalam Negeri untuk mendukung daya saing.
- Keterbatasan ragam dan spesifikasi produk dalam negeri yang dibutuhkan, khususnya untuk produk teknologi atau perangkat canggih.

Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

- Melakukan sosialisasi internal untuk meningkatkan kesadaran satuan kerja tentang pentingnya penggunaan produk dalam negeri.
- Melakukan rapat koordinasi setiap Triwulan untuk memastikan keterpenuhan target penggunaan Produk Dalam Negeri dan UMKM sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan.
- Mengumpulkan umpan balik dari satuan kerja untuk mengidentifikasi kendala dan solusi yang tepat demi meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri.

Rekomendasi

Melakukan koordinasi intensif dengan Biro Perencanaan dan Biro Umum untuk mengetahui metode perhitungan capaian indikator ini pada tahun 2025.

IKSK 2.13. Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Komdigi yang Dilakukan Secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024

SK.2 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN				
NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4/3)
1.	Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Komdigi yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024	Min. 30% (dari total Rencana Pengadaan melalui Penyedia	37,50% (dari total Rencana Pengadaan melalui Penyedia)	125%

Tabel 3.17 Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Komdigi yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024

Indikator ini masih memiliki keterkaitan dengan indikator sebelumnya di mana merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. IKSK 3.5. dilaksanakan untuk mengukur persentase belanja pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik (e-purchasing) lingkup Badan Pengembangan SDM Komdigi tahun 2024.

Adapun selama Tahun 2024, Badan Pengembangan SDM Komdigi telah melakukan belanja pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik (e-purchasing) sebesar Rp 51.196.528.692.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Berdasarkan arahan dari Biro Umum, metode perhitungan capaian untuk indikator ini dilakukan dengan membagi Nilai Pelaksanaan Belanja melalui e-Purchasing dengan Pagu PBJ yang telah dikurangi dengan swakelola dan paket multiyears (kontrak tahun jamak) di STMM Yogyakarta. Oleh karena itu, berdasarkan Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan Kinerja Anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital Periode s.d. Bulan Desember Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan Kementerian Komunikasi dan Digital, maka capaian untuk indikator ini yaitu:

$$\frac{\text{Pelaksanaan Belanja Melalui e-Purchasing} = \text{Rp } 51.196.528.692}{\text{Pagu PBJ (dikurangi swakelola+paket multi years)} = \text{Rp } 136.541.361.844} \times 100\% = 37,50\%$$

Apabila capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 30%, maka persentase realisasi indikator ini yaitu 125%.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Tidak ada Pagu anggaran dan Realisasi Anggaran

Faktor Pendukung

1. Adanya arahan, dukungan serta instruksi dari pimpinan yang secara jelas mendorong penggunaan sistem elektronik dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Regulasi dan kebijakan yang mendukung seperti Peraturan Presiden, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau peraturan pendukung lainnya yang mewajibkan atau menekankan penggunaan *E-Purchasing*.
3. Sistem *E-Purchasing* khususnya versi 5 yang memungkinkan pengguna (PPK, Pejabat Pengadaan)

untuk melakukan transaksi untuk berbagai pengadaan yang tidak dimungkinkan dilakukan dengan metode pengadaan lainnya seperti Sewa, Langganan Internet/ISP, jasa tenaga kebersihan/keamanan, dan pengadaan rutin lainnya.

4. Prosedur administrasi yang ringkas jika pengadaan dilakukan dengan metode *E-Purchasing*, misalnya penyeragaman format dokumen, percepatan proses pemilihan penyedia, negosiasi dan penetapan pemenang.
5. Penetapan target yang terukur (dalam hal ini 30% di awal tahun) dan pemantauan rutin (bulanan/triwulanan) sehingga diketahui di mana posisi capaian saat ini dan apa saja hambatan yang muncul.

Rekomendasi

1. Melakukan koordinasi intensif dengan Biro Perencanaan dan Biro Umum untuk mengetahui metode perhitungan capaian indikator ini pada tahun 2025.



Faktor Penghambat/Kendala

- Tidak semua barang atau jasa yang dibutuhkan tercantum di eKatalog, sehingga satuan kerja terpaksa menggunakan metode pengadaan lain. Terkadang keterbatasan jumlah penyedia di eKatalog juga membuat harga belum kompetitif atau kesulitan memilih penyedia yang sesuai kebutuhan teknis.
- Belum semua personal pengadaan di satuan kerja BPSDM Komdigi familiar atau terlatih dalam menggunakan sistem *E-Purchasing*.
- Gangguan atau kesalahan pada sistem yang menyebabkan proses pengadaan tersendat, utamanya pasca transisi pemerintahan baru serta menunggu nomenklatur baru Kementerian Komdigi.
- Belum semua personal pengadaan di satuan kerja BPSDM Komdigi familiar atau terlatih dalam menggunakan sistem *E-Purchasing*.
- Gangguan atau kesalahan pada sistem *E-Purchasing* yang menyebabkan proses pengadaan tersendat, utamanya pasca transisi pemerintahan baru serta menunggu nomenklatur baru Kementerian Komdigi.

Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

- Memperluas jenis barang/jasa yang tersedia di eKatalog melalui koordinasi dengan UKPBJ Kementerian Komdigi dan LKPP, sehingga kebutuhan spesifik satuan kerja dapat terpenuhi & mendorong penyedia untuk mendaftar ke eKatalog atau memperbarui informasi produk agar harga dan ketersediaan menjadi lebih kompetitif.
- Mengadakan pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, maupun staf pelaksana yang terlibat dalam proses *E-Purchasing* untuk memperluas pelaksanaan program dan kegiatan yang pengadaannya dapat dilakukan dengan metode *E-Purchasing*.
- Membuat mekanisme pelaporan rutin (bulanan/triwulanan) mengenai persentase realisasi *E-Purchasing* pada masing-masing satker, disertai analisis kendala yang dihadapi.
- Mengadakan pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, maupun staf pelaksana yang terlibat dalam proses *E-Purchasing* untuk memperluas pelaksanaan program dan kegiatan yang pengadaannya dapat dilakukan dengan metode *E-Purchasing*.
- Membuat mekanisme pelaporan rutin (bulanan/triwulanan) mengenai persentase realisasi *E-Purchasing* pada masing-masing satker, disertai analisis kendala yang dihadapi.

B. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Sekretariat Badan Pengembangan SDM pada TA 2024 sebesar Rp 71.811.669.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM). Realisasi anggaran pada TA 2024 mencapai sejumlah Rp 69.440.823.961,- (96,70%).

Untuk dapat membandingkan performa dalam tahun anggaran sebelumnya dapat dilihat pada matriks kinerja anggaran Sekretariat Badan Pengembangan SDM dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024:

	2023	2024
Pagu Awal (Rp)	124.659.711.000	74.062.443.000
Pagu Revisi (Rp)	123.176.283.000	71.811.669.000
Realisasi (Rp)	116.233.659.627	69.440.823.961
Realisasi (%)	94,36%	96,70%

Tabel 3.18 Kinerja Anggaran Badan Pengembangan SDM Komdigi 2023-2024

Namun, pada TA 2024, terdapat pagu blokir di Sekretariat Badan Pengembangan SDM sebesar Rp 1.511.554.000. Oleh karena itu, pagu setelah blokir di Sekretariat Badan Pengembangan SDM sebesar Rp 70.300.115.000.

Berdasarkan pagu setelah blokir tersebut, maka rincian belanja di Sekretariat Badan Pengembangan SDM per jenis belanja pada TA 2024 dapat dilihat pada matriks berikut:

Realisasi per Belanja (Rupiah Murni)

Realisasi TA 2024 (SAKTI)	Pagu	Realisasi	Sisa	%
Belanja Pegawai	29.469.283.000	29.388.257.632	81.025.368	99,73%
Belanja Barang	39.803.234.000	39.033.171.358	770.062.642	98,07%
Belanja Modal	1.027.598.000	1.019.394.971	8.203.029	99,20%
Total	70.300.115.000	69.440.823.961	859.291.039	98,78%

Sehingga apabila realisasi anggaran pada TA 2024 dibandingkan dengan pagu setelah blokir TA 2024, persentase penyerapan anggaran di Sekretariat Badan Pengembangan SDM pada TA 2024 sebesar 98,78%.

BAB 4 PENUTUP

Sekretariat Badan Pengembangan SDM telah melaksanakan tugas pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika pada periode Tahun 2024 melalui program kerja Tahun 2024 sesuai Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengembangan SDM Tahun 2024.

Secara keseluruhan Sekretariat Badan Pengembangan SDM telah menjalankan program/kegiatan secara maksimal dan optimal pada Tahun 2024. Diskresi pimpinan yang adaptif membuat seluruh jajaran Badan Pengembangan SDM Komdigi mampu mengejar target yang telah ditetapkan, bahkan beberapa di antaranya melampaui target. Berikut ikhtisar capaian Sekretariat Badan Pengembangan SDM Tahun Anggaran 2024, yang dapat kami sampaikan:

1. Dari 15 (lima belas) IKS yang telah ditetapkan, terdapat 13 (tiga belas) IKS yang memiliki capaian kinerja dengan persentase lebih dari 80% dibanding target. Adapun untuk 1 (satu) IKS yang memiliki capaian kinerja dengan persentase lebih dari 50% dibanding target yaitu Persentase (%) Peserta yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Kementerian Komdigi yang Lulus Tepat Waktu. Lalu terdapat 1 (satu) IKS yang memiliki capaian kinerja yang masih dibawah target yaitu indikator Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di BPSDM Komdigi pada tahun 2024.
2. Rekap performa masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Program

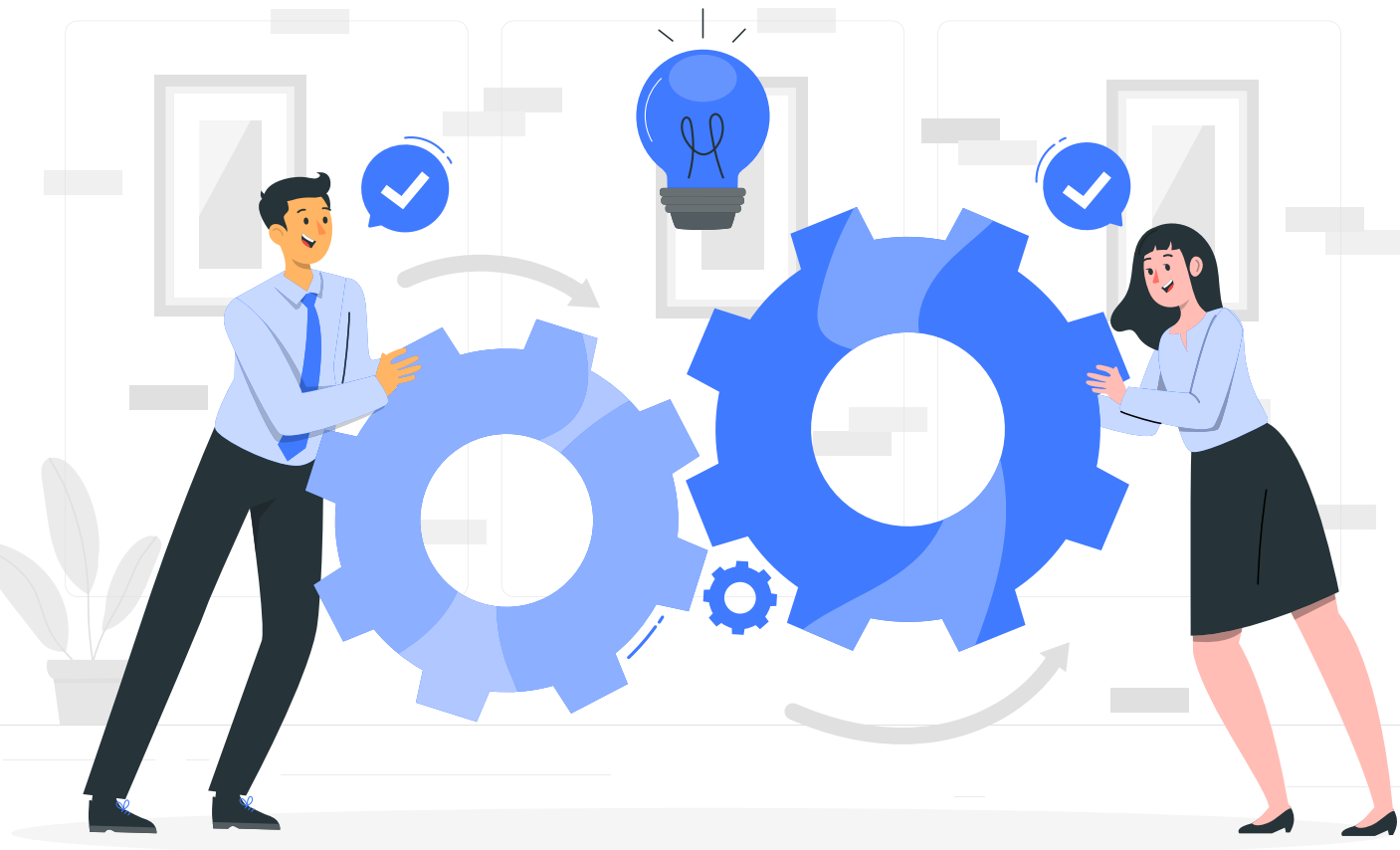
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKASI KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	PRESENTASE REALISASI 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Komdigi Tahun 2024 Jumlah Penerima Program Beasiswa S2 dan S3 Internal Kementerian Komdigi	90% 50	50% 49	55,56% 98
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan SDM yang Bersih dan Efisien	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPSDM Komdigi Tahun 2024	91	100	109,89%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKASI KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	PRESENTASE REALISASI 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan SDM yang Bersih dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPSDM tahun 2024	72,85	74,80	102,68%
		Nilai Maturitas SPIP BPSDM Komdigi Tahun 2024	3,19	3,01	94,36%
		Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Komdigi Tahun 2024	93,69	93,98	100,31%
		Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA EI) BPSDM Komdigi Tahun 2024	90	95	105,56%
		Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BPSDM Komdigi Tahun 2024	98	97,27	99,26%
		Persentase (%) Batas Tertinggi Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Komdigi Tahun 2024	≤1%	0,09%	9%
		Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di BPSDM Komdigi pada tahun 2024	70%	70%	100%
		Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di BPSDM Komdigi pada tahun 2024	30%	0	100%
		Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Perundang-undangan, Telaah Hukum, dan Kerjasama di BPSDM Komdigi Tahun 2024	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen BPSDM tahun 2024	3,91	4,08	104,35%
		Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Komdigi Tahun 2024	40%	111,89%	279,73%
		Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Komdigi yang Dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024	30%	36,28%	120,93%

Tabel 4.1 Performa Indikator Kinerja Sasaran Program

Sekretariat Badan Pengembangan SDM perlu mengambil langkah perbaikan untuk meningkatkan performa kinerja pada periode selanjutnya, meliputi:

1. Pematangan perencanaan program dan penyusunan anggaran serta kegiatan untuk memastikan program dan anggaran berjalan secara optimal, efektif, dan efisien.
2. Optimalisasi agenda kegiatan agar lebih efektif dan efisien, dengan didukung oleh monitoring dan evaluasi berkala.
3. Koordinasi intensif dengan Satuan Kerja/ UPT di lingkup BPSDM Komdigi serta lingkup Kementerian Komdigi.
4. Identifikasi dan mitigasi risiko secara berkala melalui mekanisme Manajemen Risiko.



Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media*. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1278.

Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika*. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1120.

Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika*. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 444.

Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 445.

Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842.

Indonesia. 2014. *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80.

Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 96.

Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749.

Indonesia. 2017. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Lembaran Negara Nomor 63.

Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10.

Indonesia. 2021. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 192.

Indonesia. 2018. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245.

Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

Indonesia. 2018. *Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6245.

Dokumen Pendukung

Indonesia. 2022. *Executive Summary Indeks Masyarakat Digital (IMDI)*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Indonesia. 2023. *Laporan Tahunan Program Vocational School Graduate Academy Digital Talent Scholarship*.

Indonesia. 2023. *Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Tahun 2023*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Jakarta. 2023. *Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Tahun 2020-2024*. Badan Penelitian dan Pengembangan SDM.

Internet

<https://www.antaranews.com/berita/3314226/pemerataan-indeks-masyarakat-digital-perlu-digiatkan-di-daerah>

“Jokowi Sebut APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan Utama, Apa Saja?”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211129/10/1471608/jokowi-sebut-apbn-2023-fokus-pada-6-kebijakan-utama-apa-saja>, diakses 30 Januari 2023

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berkenalan-dengan-konsep-reformasi-birokrasi-general-dan-reformasi-birokrasi-tematik>

<https://kumparan.com/kumparantech/skor-indeks-masyarakat-digital-37-8-dari-100-literasi-digital-ri-masih-rendah-lzTXxrvRAHO/4>

Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Kementerian PPN/BAPPENAS. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Dit%20Evaluasi%2C%20dan%20Pengendalian%20Penyusunan%20Perencanaan%20Pembangunan/Ringkasan%20RKP%202023.pdf

Sarwohadi, Sandjaja. *Arah Pembangunan Bidang Aparatur Negara dalam RPJMN 2020-2024 dan Rancangan Awal RKP 2023*, disampaikan pada Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, https://bkd.jatengprov.go.id/assets/download/Arah_Pembangunan_Bid._Aparatur_Negara_dan_Ranwal_RKP_2023_final_-_BKD_Jateng.pdf

<https://kilaskementerian.kompas.com/kemenKomdigi/read/2023/12/22/10233171/lewat-digiers-day-kemenKomdigi-hadirkan-terobosan-peningkatan-kompetensi>

https://lan.go.id/?page_id=1872

<https://www.antaranews.com/berita/2887373/pemerintah-siapkan-sdm-digital-yang-unggul-dan-berdaya-saing>

https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_sampaikan_lima_fokus_rapbn_2023

Lampiran

Lampiran 1. : Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Komdigi Tahun 2024.

Lampiran 2. : SOP Verifikasi Data Peserta *Digital Talent Scholarship*.

Lampiran 3. : SOP Pengumpulan Data Kinerja Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan Badan Pengembangan SDM Komdigi.



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Dalam melaksanakan tugas sebagai Plt. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja ini.
2. Bersedia dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini secara akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
5. Bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	1. Persentase (%) Peserta yang Lulus Program Beasiswa S2 Dan S3 Kementerian Kominfo yang Lulus Tepat Waktu	90% (3 peserta dari 4 peserta)
		2. Jumlah Penerima Program Beasiswa S2 Dan S3 Internal Kementerian Kominfo	50 Orang
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BPSDM Kominfo yang Bersih dan Efisien	1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPSDM Kominfo Tahun 2024	91 (Penilaian Itjen)
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) BPSDM Kominfo Tahun 2024	72,85 (Penilaian Itjen)
		3. Nilai Maturitas SPIP BPSDM Kominfo Tahun 2024	3,19 (Penilaian Itjen)
		4. Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Kominfo Tahun 2024	93,69
		5. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) BPSDM Kominfo Tahun 2024	90
		6. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BPSDM Kominfo Tahun 2024	98
		7. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Kominfo Tahun 2024	≤ 1%
		8. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di BPSDM Kominfo pada Tahun 2024	70%
		9. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di BPSDM Kominfo pada Tahun 2024	30%
		10. Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Telaah Hukum dan Kerjasama di BPSDM Kominfo Tahun 2024	100%
		11. Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen BPSDM Kominfo Tahun 2024	3,91
		12. Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Kominfo Tahun 2024	Min. 40% (dari total Nilai Anggaran Belanja Barang/Jasa)

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		13. Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Kominfo yang dilakukan secara Elektronik (<i>E-Purchasing</i>) Tahun 2024	Min. 30% (dari total Rencana Pengadaan Melalui Penyedia)

Kegiatan		Anggaran	
1.	Pengembangan Kompetensi Digital Bagi Masyarakat	Rp.	20.331.009.000
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Balitbang SDM	Rp.	53.731.434.000
Total Anggaran		Rp.	74.062.443.000

Jakarta, 16 Februari 2024

Pejabat Penilai
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika,


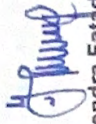


Hary Budiarto

Pejabat yang Dinilai
Plt. Sekretaris Badan Penelitian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Hendra Fatadona

 <p align="center">KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PENGEMBANGAN SDM</p>	NOMOR SOP : 36/BLSDM.1/01/2024 TGL. PEMBUATAN : 02/01/2024 TGL. REVISI : - TGL. EFEKTIF : - DISAHKAN OLEH :  Plt. Sekretaris Badan Litbang SDM (Hendra Fatadona) NIP. 19800916 200803 1 003	NAMA SOP : VERIFIKASI JUMLAH PESERTA DTS KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan	
	DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 4. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12/PER/M.KOMINFO/07/2010/ tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 5. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Kementerian Komunikasi dan Informatika 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika 7. Nota Dinas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Nomor 41/BLSDM/PR.04/03/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Definisi dan Kriteria Peserta Program Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy TA 2022	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Lembar Kerja/Laporan 2. Komputer / Printer / Scanner 3. Jaringan Internet PENCATATAN DAN PENDATAAN : Disimpan sebagai data elektronik dan manual	
	KETERKAITAN : 1 2	PERINGATAN :	

NO	AKTIVITAS/DESKRIPSI	KEPALA BPSDM	SEKRETARIS BUDN	KEPALA SATKER/DPT	ASISTEN WFI DTS POKJAD/PT	POJKA AKADEMIK/PTN PEMBERANGKAS/PTN UPT	TIM MONITORING/PEMERIKSA/PELAYANAN/DAIR/SEKSI/DAIR	KEPALA DPT/PTN	WAKTU	OUTPUT	REVISI
1	Memeriksa/pemeriksaan verifikasi data capaian DTS								30 menit	Daftar capaian DTS	
2	Perencanaan/identifikasi/analisis/evaluasi BPSDM terkait permasalahan verifikasi data capaian DTS								30 menit	Daftar capaian DTS	
3	Memeriksa/pemeriksaan verifikasi data capaian DTS								30 menit	Daftar capaian DTS	
4	Memeriksa/pemeriksaan verifikasi data capaian DTS								30 menit	Daftar capaian DTS	
5	Memeriksa/pemeriksaan verifikasi data capaian DTS								30 menit	Daftar capaian DTS	
6	Memeriksa/pemeriksaan verifikasi data capaian DTS								30 menit	Daftar capaian DTS	
7	Memeriksa/pemeriksaan verifikasi data capaian DTS								30 menit	Daftar capaian DTS	
8	Memeriksa/pemeriksaan verifikasi data capaian DTS								30 menit	Daftar capaian DTS	
9	Memeriksa/pemeriksaan verifikasi data capaian DTS								30 menit	Daftar capaian DTS	
10	Memeriksa/pemeriksaan verifikasi data capaian DTS								30 menit	Daftar capaian DTS	
11	Memeriksa/pemeriksaan verifikasi data capaian DTS								30 menit	Daftar capaian DTS	
12	Memeriksa/pemeriksaan verifikasi data capaian DTS								30 menit	Daftar capaian DTS	
13	Memeriksa/pemeriksaan verifikasi data capaian DTS								30 menit	Daftar capaian DTS	
14	Memeriksa/pemeriksaan verifikasi data capaian DTS								30 menit	Daftar capaian DTS	
15	Memeriksa/pemeriksaan verifikasi data capaian DTS								30 menit	Daftar capaian DTS	
16	Memeriksa/pemeriksaan verifikasi data capaian DTS								30 menit	Daftar capaian DTS	
17	Memeriksa/pemeriksaan verifikasi data capaian DTS								30 menit	Daftar capaian DTS	

Disahkan Oleh:
 P. Lit. Sekretaris Badan Litbang SDM
 (Mendra Fakadona)
 NIP. 19800916 200803 1 003



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 BADAN PENGEMBANGAN SDM**

	NOMOR SOP	33/BLSDM.101/2024
	TGL. PEMBUATAN	02/01/2024
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF DISAHKAN OLEH	PII. Sekretaris Badan Litbang SDM
NAMA SOP		PENGUMPULAN DATA KINERJA BULANAN, TRIWULAN, SEMESTER DAN TAHUNAN BADAN LITBANG SDM
KUALIFIKASI PELAKSANA :		1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
DASAR HUKUM:		1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 4. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12/PER/M.KOMINFO/2010/ tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 5. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Kementerian Komunikasi dan Informatika 6. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor: PER-1/AG/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kinerja Anggaran 7. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
KETERKAITAN :		1. Lembar Kerja/Laporan 2. Komputer / Printer / Scanner 3. Jaringan Internet
PERINGATAN :		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA BULANAN, TRIWULAN, SEMESTER DAN TAHUNAN BADAN LITBANG SDM

NO	AKTIVITAS/KEGIATAN	KEPALA BPSDM	SEKRETARIS BLSDM	KETUA TIM KERJA PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KERJASAMA	TIM FOKUS	SATUAN KERJA/UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BPSDM	MUTU BARU			KET
							SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1	Mendisposisikan Penyusunan Evaluasi Laporan BLSDM berdasarkan permintaan Bappenas/Kemendagri & RB melalui Selgen						Surat dari Selgen	30 menit	Disposisi KabPSDM	
2	Meminta/terjadi disposisi KabPSDM dengan arahan kepada ketua Tim Kerja Perencanaan, Pelaporan, dan Kerjasama/Koordinator Bagian PPP						Disposisi KabPSDM	30 menit	Disposisi Sekretaris BLSDM	
3	Meminta/terjadi disposisi Sekretaris BLSDM tentang penyusunan draft Evaluasi Laporan BPSDM dan mempersiapkan rapat						Disposisi Sekretaris BLSDM	30 menit	Disposisi	
4	Mengkoordinasikan ke semua satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSDM untuk mempersiapkan draft Laporan dan Evaluasi Bulanan, Triwulan, Semester masing-masing satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)						Disposisi	2 hari	hasil koordinasi	
5	Penyusunan & menyampaikan draft Laporan dan Evaluasi Bulanan, Triwulan, Semester kepada Sejabat/tingkat SDM						hasil koordinasi	3 hari	UPT Laporan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)	
6	Menerima draft Laporan dan Evaluasi Bulanan, Triwulan, Semester masing-masing satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), kemudian membuat disposisi untuk mendahului penyusunan Laporan dan Evaluasi Bulanan, Triwulan, Semester BPSDM						Draft laporan satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)	30 Menit	Disposisi	
7	Menerima disposisi Sekretaris BLSDM tentang penyusunan draft Laporan dan Evaluasi Bulanan, Triwulan, Semester masing-masing satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) kemudian melaksanakan koordinasi dengan pembina/pengarah terkait penyusunan Laporan dan Evaluasi Bulanan, Triwulan, Semester BPSDM						Disposisi	1 jam	disposisi	
8	Mengkoordinasikan dengan JPU untuk mengompilasi, mengoreksi dan verifikasi draft Laporan dan Evaluasi Bulanan, Triwulan, Semester dan masing-masing pembina/pengarah terkait penyusunan Laporan dan Evaluasi Bulanan, Triwulan, Semester BPSDM, kemudian disampaikan kepada Sejabat/tingkat SDM						disposisi	2 hari	disposisi	
9	Menerima draft Laporan dan Evaluasi Bulanan, Triwulan, Semester BPSDM, kemudian disampaikan kepada Sejabat/tingkat SDM						disposisi	1 jam	Draft Laporan BPSDM	
10	Menerima dan memberikan hasil draft Laporan dan Evaluasi Bulanan, Triwulan, Semester BPSDM, kemudian disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM untuk disahkan.						Draft Laporan BLSDM	1 jam	Draft Laporan BPSDM	
11	Membuat pengesahan draft Laporan dan Evaluasi Bulanan, Triwulan, Semester BPSDM, untuk disampaikan ke Selgen.						Draft Laporan BPSDM	1 jam	Dokumentasi Laporan dan Evaluasi Bulanan, Triwulan, Semester BPSDM	

JURILAR WAKTU 7 Hari, 6 Jam

Disahkan Oleh :
 PHL Sekretaris Badan Litbang SDM
 Hedy F. Perdana
 NIP. 19600916 300803 1 003





KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia